

**SEKURITISASI HUNGARIA TERHADAP ISU KRISIS  
PENGUNGSIS ALAS SURIAH SEBAGAI ANCAMAN  
KEAMANAN NASIONAL TAHUN 2015-2018**

TESIS



Oleh:

Deni Irawan

NPM: 8091901003

Pembimbing:

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SEKURITISASI HUNGARIA TERHADAP ISU KRISIS PENGUNGSI  
ASAL SURIAH SEBAGAI ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL TAHUN  
2015-2018**



Oleh:

Deni Irawan

NPM: 8091901003

Persetujuan Untuk Sidang Tesis pada Hari/Tanggal:

Kamis, 22 April 2021

Pembimbing:

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan data diri berikut:

Nama : Deni Irawan  
NPM : 8091901003  
Program Studi : Magister Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

Sekuritisasi Hungaria Terhadap Isu Krisis Pengungsi Asal Suriah Sebagai  
Ancaman Keamanan Nasional Tahun 2015-2018

Adalah benar-benar karya saya sendiri dengan bantuan bimbingan Pembimbing,  
dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara dan  
metode yang tidak sesuai dengan etika penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku  
dalam ruang lingkup keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya  
bersedia menerima sanksi dan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
di Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : April 2021

**Deni Irawan**

## HALAMAN MOTO



***“You Have Power Over Your Mind – Not Outside Events.***

***Realize This, and You Will Find Strength.”***

*Marcus Aurelius Antoninus*

*(The Last Emperor of Pax Romana – The Last of The Five Good  
Emperors of Roman Empire and Stoic philosopher)*

---

*“Alone of the emperors, he gave proof of his learning not by mere words or knowledge of philosophical doctrines but by his blameless character and temperate way of life. The emperor’s Stoic philosophy – which is about self-restraint, duty, and respect for others – was so abjectly abandoned by the imperial line he anointed on his death.”*

SEKURITISASI HUNGARIA TERHADAP ISU KRISIS PENGUNGSI ASAL  
SURIAH SEBAGAI ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL TAHUN 2015-  
2018

Deni Irawan

NPM: 8091901003

Pembimbing: Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D.

**ABSTRAK**

Hungaria adalah pihak dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Uni Eropa yang memiliki mandat untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi. Faktanya Hungaria melakukan penolakan masuknya pengungsi ke dalam wilayahnya. Berangkat dari fakta tersebut, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana Hungaria melakukan proses sekuritisasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan memakai teori sekuritisasi dalam menganalisis proses sekuritisasi tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa proses sekuritisasi yang dilakukan Hungaria mencakup tiga unit analisis: *securitizing actors* yaitu pemerintah Hungaria, partai Fidesz, dan Perdana Menteri Viktor Orban, melakukan *speech act* berupa verbal dan non-verbal dalam menunjukkan kepada *referent object*, yaitu masyarakat Hungaria bahwa pengungsi dari Suriah telah menjadi ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional. Tesis ini menemukan bahwa sekuritisasi yang dilakukan Hungaria terhadap pengungsi asal Suriah disebabkan oleh kepercayaan bahwa selain alasan keamanan dan ekonomi, aspek budaya dan nilai-nilai Kristiani komunitas Hungaria telah terancam oleh budaya Islam yang dibawa bersama dengan kedatangan para pengungsi asal Suriah, sehingga membuat pemerintah Hungaria harus mengambil langkah tegas dalam menangani ancaman budaya Islam terhadap budaya Kristiani.

Kata kunci: Ancaman, Eropa, Hungaria, Krisis Pengungsi, Sekuritisasi.

*HUNGARY'S SECURITIZATION OF THE SYRIAN REFUGEE CRISIS AS A  
NATIONAL SECURITY THREAT IN 2015-2018*

Deni Irawan

NPM: 8091901003

*Advisor: Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D*

***ABSTRACT***

*Hungary is a party to the 1951 Refugee Convention and the European Union which has a mandate to provide protection for refugees. The fact is Hungary has refused the entry of refugees into its territory. Departing from these facts, this study seeks to explain how Hungary carried out the securitization process. This study uses qualitative research methods, and uses the theory of securitization in analyzing the securitization process. The results of this study found that the securitization process carried out by Hungary included three units of analysis: securitizing actors, namely the Hungarian government, the Fidesz party, and Prime Minister Viktor Orban, conducting verbal and non-verbal speech acts in showing the referent object, namely the Hungarian community that refugees from Syria has become an existential threat to national security. This thesis finds that the securitization carried out by Hungary towards Syrian refugees was caused by the belief that in addition to security and economic reasons, the cultural aspects and Christian values of the Hungarian community were threatened by the Islamic culture that was brought along with the arrival of refugees from Syria, thus making the Hungarian government must take decisive steps in dealing with the threat of Islamic culture to Christian culture.*

*Keywords: Europe, Hungary, Refugee Crisis, Securitization, Threat.*

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala bentuk cinta dan kasih, perlindungan serta kehidupan yang terus berjalan samapi dengan saat ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul “Sekuritisasi Hungaria Terhadap Isu Krisis Pengungsi Asal Suriah Sebagai Ancaman Keamanan Nasional Hungaria Tahun 2015-2018”.

Penyusunan tesis ini mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk non-material dan material. Maka dari itu, peneliti mengucapkan terima kasih banyak khususnya atas kesediaan pembimbing dan para penguji dalam membantu proses penyusunan tesis ini. Peneliti berharap agar segala dukungan yang telah diberikan diganti dengan balasan oleh dari Tuhan Yang Maha Esa.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, peneliti mengharapkan kesediaannya untuk memberikan kritik dan saran konstruktif atas tesis ini. Akhir kata, peneliti berharap agar tesis ini dapat menjadi manfaat terhadap semua pihak, khususnya bagi para pengkaji Ilmu Hubungan Internasional.

Bandung, April 2021

**Deni Irawan**

## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Yulius Purwadi Hermawan, Ph. D., selaku pembimbing tunggal dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas saran, masukan, motivasi, dan pemakluman dari Mas Pur berikan selama peneliti melakukan penyusunan tesis.
2. Bapak Dr. I Nyoman Sudira dan Bapak Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan selaku penguji dalam penyusunan tesis ini.
3. Segenap sivitas akademika Program Studi Magister HUBungan Internasional, khususnya para dosen yang menjadi teladan bagi peneliti; Bapak Yulius Purwadi Hermawan, Ph. D., Bapak Dr. I Nyoman Sudira, Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, Bapak Sapta Dwikardana, Ph. D., Bapak Mangadar Situmorang, Ph. D., Bapak Dr. Adelbertus Irawan J. Hartono, Ibu Sukawarsini Djelantik, Ph. D., dan Bapak Idil Syawfi, M.Si.
4. Ibu Paramitaningrum, Ph. D., selaku akademika Fakultas Humanitarian Program Hubungan Internasional Universitas BINUS dan narasumber dalam penelitian yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak terhormat, Bapak A. Kosim yang sosoknya selalu menjadi patokan bagi peneliti dalam menjalani hidup yang baik sebagai seorang laki-laki, mengajarkan untuk menjadi teladan bagi adik-adik dan sebagai representasi dari orang tua.
6. Ibu terkasih dan tersayang, Ibu Sumirah yang telah menjadi sosok yang kuat dan berharga dalam hidup peneliti, tidak ada kata atau kalimat yang dapat membantu peneliti dalam mengutarakan rasa terima kasih.

7. Adik Pertama, Danil Setiawan, baik itu sikap ataupun pendirian masih tetap menjadi sebuah misteri, tapi apapun tujuanmu semua akan baik-baik saja.
8. Adik Kedua, Bunga Adelia Putri, adik dan anak yang baik dan penurut, perempuan yang baik dan menjadi kebanggaan orang tua.
9. Adik Bungsu, Bayu Anugrah, adik bungsu dan anak yang selalu menjadi pelipur lara orang tua, calon laki-laki yang baik dan menjadi kebanggaan orang tua.
10. Putri Siti Maryani, terima kasih telah menerima, menjaga, dan menemani, dan juga berjanji untuk terus menemani.

Bandung, April 2021

**Deni Irawan**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN MOTO .....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Fokus Masalah .....	13
1.3.1 Pembatasan Waktu.....	13
1.3.2 Pembatasan Bidang.....	13
1.4 Perumusan Masalah .....	14
1.5 Tujuan Penelitian .....	14

1.6 Manfaat Penelitian .....	15
1.7 Tinjauan Pustaka .....	15
1.8 Kerangka Pemikiran.....	21
1.8.1 Pendekatan Konstruktivisme.....	22
1.8.2 Teori Sekuritisasi .....	25
1.8.3 Konsep Ancaman Eksistensial dan Keamanan Komunitas.....	30
1.8.4 Konsep Keamanan Non-Tradisional .....	35
1.8.5 Konsep Pengungsi.....	40
1.8.6 Konsep Politik Identitas .....	45
1.8.7 Konsep Kepentingan Nasional.....	49
1.9 Metode Penelitian .....	52
1.9.1 Tipe Penelitian .....	53
1.9.2 Instrumen Penelitian .....	53
1.9.3 Teknik Pengumpulan Data.....	54
1.9.4 Teknik Analisis Data.....	54
1.9.4.1 Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ) .....	55
1.9.4.2 Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ) .....	55
1.9.4.3 Kesimpulan dan Verifikasi .....	56
1.9.5 Lini Masa Penelitian .....	56
1.10 Sistematika Penulisan .....	56

BAB II ISU KRISIS PENGUNGSI DI KAWASAN EROPA SEBAGAI ANCAMAN EKSISTENSIAL TERHADAP HUNGARIA .....	59
2.1 Dinamika Krisis Pengungsi Di Kawasan Eropa .....	60
2.1.1 Dinamika <i>Push and Pulling Factors</i> Dalam Isu Krisis Pengungsi di Eropa .....	66
2.1.2 Dinamika Identitas <i>European</i> , Sikap Terhadap Pengungsi, Dan <i>Euroscepticism</i> .....	70
2.2 Dualisme Dalam Uni Eropa Terhadap Isu Krisis Pengungsi.....	76
2.2.1 Isu Krisis Pengungsi Sebagai Sebuah Tanggung Jawab.....	76
2.2.2. Isu Krisis Pengungsi Sebagai Sebuah Ancaman Eksistensial.....	79
2.3 Isu Krisis Pengungsi Sebagai Ancaman Eksistensial Terhadap Keamanan Nasional Hungaria .....	81
2.3.1 Isu Krisis Pengungsi Sebagai Ancaman Eksistensial Terhadap Budaya Kristiani Masyarakat Hungaria .....	81
2.3.2 Isu Krisis Pengungsi Sebagai Ancaman Eksistensial Terhadap Keamanan dan Ekonomi Masyarakat Hungaria .....	87
2.3.3 Isu Krisis Pengungsi Sebagai Ancaman Eksistensial Terhadap Kedaulatan Hungaria di Uni Eropa.....	92
 BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH HUNGARIA SEBAGAI <i>EXTRAORDINARY MEASURES</i> TERHADAP KRISIS PENGUNGSI DI EROPA .....	97

3.1 Kebijakan Konstitusional Pemerintah Hungaria Sebagai <i>Extraordinary Measures</i> Terhadap Isu Krisis Pengungsi.....	98
3.1.1 Konstitusi Hungaria Terkait Pengungsi .....	98
3.1.2 Konstitusi No. T/332 Kebijakan “ <i>Seventh Amendment</i> ” Amandemen Hukum Fundamental Hungaria Terkait Pengungsi.....	99
3.1.3 Konstitusi No. T/333 Kebijakan “ <i>Stop Soros</i> ” Kejahatan “Memfasilitasi Migrasi Ilegal” Terkait Pengungsi .....	106
3.2 Instrumen Implementasi Kebijakan Pemerintah Hungaria Sebagai <i>Extraordinary Measures</i> Terhadap Isu Krisis Pengungsi .....	111
3.2.1 Penolakan Hungaria Terhadap Perjanjian Dublin Terkait Sistem Kuota Pengungsi .....	113
3.2.2 Peningkatan Keamanan di Perbatasan Hungaria Dalam Menghalau Masuknya Pengungsi .....	118
3.2.3 Implementasi Sistem Penerimaan Aplikasi Suaka dan Kontrol Perbatasan Yang Ketat dan Tidak Transparan.....	122
 BAB IV PROSES SEKURITISASI HUNGARIA TERHADAP ISU KRISIS PENGUNGSIS ASAL SURIAH SEBAGAI ANCAMAN EKSISTENSIAL KEAMANAN NASIONAL.....	126
4.1 Proses <i>Securitizing Actor</i> Melakukan Sekuritisasi Isu Krisis Pengungsi Asal Suriah .....	126
4.1.1 Pemerintah Hungaria Sebagai <i>Securitizing Actor</i> Isu Pengungsi Asal Suriah .....	129

4.1.2 Partai <i>FIDESZ</i> Sebagai <i>Securitizing Actor</i> Isu Pengungsi Asal Suriah .....	134
4.1.3 Perdana Menteri Viktor Orban Sebagai <i>Securitizing Actor</i> Isu Pengungsi Asal Suriah .....	138
4.2 Proses <i>Speech Act</i> Oleh <i>Securitizing Actors</i> Terhadap Isu Pengungsi Asal Suriah .....	143
4.2.1 <i>Speech Act</i> Oleh <i>Securitizing Actors</i> Melalui Pernyataan Verbal.....	144
4.2.2 <i>Speech Act</i> Oleh <i>Securitizing Actors</i> Melalui Kampanye, Regulasi, Diskusi Politik, dan Iklan Anti-Pengungsi.....	149
4.3 Respon <i>Referent Object</i> Terhadap <i>Speech Act</i> Pemerintah Hungaria .....	158
4.3.1 Identitas Sebagai Pembentuk Persepsi Masyarakat Hungaria Terhadap Isu Krisis Pengungsi .....	158
4.3.2 Persepsi Masyarakat Hungaria Terhadap Isu Pengungsi Dalam Skala Nasional dan Lokal .....	165
4.3.2.1 Persepsi Masyarakat Hungaria Terhadap Isu Pengungsi Dalam Skala Nasional .....	165
4.3.2.2 Persepsi Masyarakat Hungaria Terhadap Isu Pengungsi Dalam Skala Lokal .....	172
4.3.3 Persepsi Masyarakat Hungaria Sebagai <i>Referent Object</i> Terhadap Isu Pengungsi Asal Suriah Sebagai Ancaman .....	176
BAB V KESIMPULAN.....	182

DAFTAR PUSTAKA .....	186
----------------------	-----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Waktu Penelitian.....	56
Tabel 4.1 Persepsi Tipe Ancaman: Pandangan Masyarakat Hungaria terhadap Ancaman Realistik dan Simbolik dalam Fokus Grup Diskusi, Berdasarkan Tipe Lokasi.....	173
Tabel 4.2 Persepsi Masyarakat Hungaria terhadap Dampak Positif dari Migrasi Massal, Berdasarkan Tipe Lokasi .....	174

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Sekuritisasi.....	28
Gambar 2.1 Hubungan Krisis Pengungsi Terhadap Sikap Anti-Imigran dan Euroscepticism .....	74
Gambar 2.2 Data Pengungsi Menggunakan Jalur Laut Tahun 2009-2018 .....	77
Gambar 4.1 Proses Sekuritisasi Hungaria Terhadap Isu Krisis Pengungsi Asal Suriah .....	128
Gambar 4.2 Reklame kampanye Tahap Pertama “If you come to Hungary” Pemerintah Hungaria Menolak Migran dan Pengungsi .....	149
Gambar 4.3 Reklame Kampanye Tahap Kedua “Did you know?” Pemerintah Hungaria Menolak Migran dan Pengungsi .....	151
Gambar 4.4 Rasio Masyarakat Xenofobia, Intelektual, Xenofilia di Hungaria ...	166
Gambar 4.5 Perbedaan Komponen dari Kekhawatiran yang dirasakan Masyarakat Hungaria Akibat Isu Krisis Pengungsi.....	168
Gambar 4.6 Alasan Para Pengungsi Melarikan Diri dari Negara Asal .....	169

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Hasil Wawancara .....	200
Lampiran II Riwayat Hidup Peneliti.....	208

## DAFTAR SINGKATAN

ECJ	: <i>European Court of Justice</i>
EU	: <i>European Union</i>
FIDESZ	: <i>Fiatal Demokraták Szövetsége (Alliance of Young Democrats)</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
IMISCOE	: <i>International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
KDNP	: <i>Kereszténydemokrata Néppárt (Christian Democratic People's Party)</i>
NGO	: Non-Governmental Organization
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UE	: Uni Eropa
UN	: <i>United Nations</i>
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
WFP	: <i>World Food Programme</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Permasalahan pengungsi pada saat ini menjadi perhatian berbagai pihak karena melihat berbagai konflik, kekerasan, kemiskinan dan berbagai alasan lain yang mengancam dari negara asal, masyarakat terpaksa melakukan perjalanan ke negara-negara lain. Dalam proses perjalanan ke negara lain tentunya para pengungsi akan menemukan hambatan seperti kekurangan pangan dan obat-obatan, akibat hal tersebut permasalahan terkait hak pengungsi menjadi sebuah fenomena dalam politik internasional, tetapi hal tersebut tidak serta-merta membuat negara-negara berlomba untuk membantu para pengungsi, kenyataan yang terjadi adalah regulasi imigrasi seringkali menjadi intervensi yang menyulitkan pengungsi untuk sampai ke negara tujuan yang memperburuk permasalahan pengungsi.

Dalam memperkuat solidaritas dan tanggung jawab komunitas internasional dalam menangani permasalahan pengungsi maka dibentuklah Konvensi 1951 yang membahas mengenai pengungsi dengan pihak-pihak<sup>2</sup> yang berperan sebagai pengembalian hak dan kewajiban bagi/terhadap pengungsi. Terkait perumusan standar minimum perlakuan bagi para pengungsi yang ada dalam Konvensi 1951 juga menekankan bahwa para pengungsi memiliki hak untuk mendapatkan

---

<sup>2</sup> Pihak-pihak yang dimaksud adalah penyebutan terhadap negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 terkait pengungsi.

perlindungan dari negara lain.<sup>3</sup> Dalam Konvensi 1951 juga diatur mengenai larangan pengusiran maupun pemulangan secara paksa terhadap individu yang berstatus sebagai pengungsi. Dalam Konvensi 1951 pasal 33 dibahas mengenai penetapan yang berisi tentang ketentuan bahwa negara penerima tidak dapat menolak, mengusir atau mengembalikan para pengungsi dengan alasan apapun.

Merujuk pada Konvensi 1951, dimana terdapat tiga poin utama yaitu, mengenai pengertian dasar pengungsi, mengenai status dasar hukum pengungsi, memberikan kewajiban kepada seluruh anggota Konvensi 1951 dan adanya implementasi perjanjian.<sup>4</sup> Mengenai hak-hak khusus pengungsi, Konvensi 1951 menetapkan tiga standar perlakuan: (1) perlakuan nasional, yang merupakan perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara dari negara penerima; (2) perlakuan *most-favored-nations*, perlakuan yang diberikan sama halnya kepada warga negara dari negara asal; dan (3) perlakuan *as favorable as possible*, perlakuan dalam hal apa pun tidak kurang menyenangkan daripada perlakuan yang diberikan kepada bukan warga negara.<sup>5</sup>

Dalam Konvensi 1951 dibahas dengan jelas terkait kewajiban negara-negara yang meratifikasi, diantaranya adalah negara-negara pihak berkewajiban memberikan pengungsi hak memiliki status hukum yang jelas; hak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan; hak kesejahteraan sosial

---

<sup>3</sup> Viotti, Paul R dan Kauppi, Mark V. 1999. *International Relations Theory: Realism, Globalism and Beyond*, London: Allyn and Bacon, h. 402

<sup>4</sup> Andras Tetenyi, Tamas Barczikay dan Balazs Szent-Ivanyi. (2018). "Refugees, not Economic Migrants - Why do Asylum-Seekers Register in Hungary?", *International Migration*, h.1-8

<sup>5</sup> Konvensi terkait Status Pengungsi dalam Konvensi 1951, ed. Paul Weis, 1982, *The Development of Refugee Law*, *Michigan Journal of International Law*, Vol. 3, No. 1, h. 29-30

seperti persediaan yang kurang, tempat tinggal, pendidikan, pelayanan publik dan jaminan sosial; hak aktivitas administratif seperti kartu identitas, dokumen perjalanan dan bantuan administratif. Dalam Konvensi 1951 dengan tegas dijelaskan terkait larangan pengusiran atau pengembalian pengungsi oleh negara-negara yang meratifikasi.<sup>6</sup>

Dalam persoalan pengungsi, negara-negara di Eropa memiliki regulasi yang berbeda-beda. Regulasi terhadap pengungsi yang berbeda diantara negara-negara Eropa menyebabkan perlakuan atau cara penerimaan pengungsi menjadi sebuah permasalahan.<sup>7</sup> Negara besar seperti Jerman, Italia dan Prancis menunjukkan keterbukaan terhadap pengungsi, dan dianggap ramah dalam memperlakukan para pengungsi yang mencari suaka di negara mereka, tidak heran jika negara-negara tersebut menjadi tujuan utama para pengungsi dan menjadi pendorong bagi para pengungsi untuk mencari perlindungan di wilayah Eropa.

Kebijakan Uni Eropa terhadap pengungsi tercerminkan dalam Perjanjian Dublin yang dibuat dengan tujuan untuk menentukan negara mana yang harus bertanggung jawab untuk memeriksa para pencari suaka, biasanya adalah negara yang pertama kali didatangi oleh para pencari suaka.<sup>8</sup> Dapat dilihat bahwa Uni Eropa memiliki kebijakan yang terbuka terhadap migran dan pencari suaka, tetapi dalam praktiknya sering kali persepsi negara terhadap migran dan para pencari

---

<sup>6</sup> UNHCR, Dokumen Resmi Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi.

<sup>7</sup> Human Rights Watch, *EU Policies Put Refugees at Risk*, Human Rights Watch Org., (2016), internet, <https://www.hrw.org/news/2016/11/23/eu-policies-put-refugees-risk>

<sup>8</sup> Pradana, Aldoreza. 2018. Identitas Nasional: Penggunaan Politik Identitas dalam Gelombang Pengungsi 2015 di Hungaria. ISS Brief Issue 03. h. 1-10, diakses dari <https://simpan.ugm.ac.id/s/uZRcLR2J2QrtJqV#pdfviewer>

suaka berbeda-beda, hal tersebut menyebabkan regulasi yang terdapat di tiap negara anggota Uni Eropa berbeda-beda dan sering berlawanan dengan isi dari Perjanjian Dublin.

Perubahan pola regulasi terhadap pengungsi terjadi sejalan dengan krisis pengungsi di Eropa yang menyebabkan negara seperti Hungaria, Romania, Austria, Slovakia dan Ceko mulai melakukan penolakan masuknya para pengungsi untuk masuk ke dalam negaranya, hal tersebut dibuktikan dengan sulitnya para imigran untuk masuk ke dalam wilayah Hungaria,<sup>9</sup> kemudian perlakuan yang kurang baik, kekerasan yang terjadi terhadap para pengungsi, kekurangan sumber pangan, dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang tidak memadai harus menjadi jawaban dari harapan para pengungsi untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari negara-negara Eropa.

Tindakan Hungaria berbanding terbalik dengan apa yang ada dalam Konvensi 1951, sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951, Hungaria justru mengabaikan dan menolak hak-hak para pengungsi yang datang kepada Hungaria untuk meminta pertolongan.<sup>10</sup> Krisis pengungsi yang terjadi Eropa membuat Hungaria mengambil tindakan tegas untuk menolak masuknya pengungsi dengan menutup perbatasannya dan menelantarkan para pengungsi yang telah masuk. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal, tetapi melihat bahwa Hungaria merupakan negara yang ikut meratifikasi Konvensi 1951,

---

<sup>9</sup> Zack Beauchamp, *Why Hungary is So Awful to Refugees*, Vox, (2015), internet <https://www.vox.com/2015/9/18/9349081/syrian-refugees-hungary-viktor-orban>

<sup>10</sup> Wangke, Humprey. 2016. Krisis Migran dan Masa Depan Integrasi Eropa, Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. 8 No.3 (Februari) h. 5-8.

seharusnya Hungaria terikat untuk menerima dan memberikan perlindungan kepada para pengungsi.

Kenyataan di lapangan tidak selalu sejalan dengan pedoman yang ada dalam Konvensi 1951, kebijakan Jerman untuk membuka pintunya bagi para pengungsi berbanding terbalik dengan negara-negara Balkan dan Eropa Timur seperti Hungaria, Romania, Austria, Slovakia dan Ceko-slovakia yang menolak masuknya para pengungsi masuk ke dalam wilayahnya, meskipun negara-negara tersebut merupakan anggota dari Konvensi 1951 dan telah meratifikasinya. Alasan penolakan tersebut didasarkan pada argumen bahwa para pengungsi berpotensi mengancam keamanan nasional dengan mengaitkan antara migrasi, terorisme dan pengangguran, dengan alasan tersebut negara-negara menyatakan sudah tidak sanggup untuk menerima para pengungsi yang semakin meningkat.<sup>11</sup>

Krisis pengungsi di Eropa dapat dikategorikan ke dalam tiga fenomena yang saling berkaitan, dimana fenomena pertama adalah arus pengungsi yang begitu tinggi akhirnya menyebabkan sebagian negara di Eropa, dalam hal fenomena Hungaria menutup akses bagi pengungsi untuk masuk ke dalam wilayahnya. Fenomena kedua akibat krisis pengungsi menunjukkan ketidakkonsistenan sikap negara yang meratifikasi Konvensi 1951, dalam hal ini Hungaria tidak memenuhi hak dan kewajiban bagi/terhadap pengungsi. Fenomena ketiga adalah Uni Eropa memiliki Perjanjian Dublin, yang isinya adalah bahwa negara anggota Uni Eropa yang menjadi tujuan pengungsi bertanggung jawab untuk proses suaka para

---

<sup>11</sup> Attila, Hunyadi, Bulcsu, Zgut, Edit Juhasz, *Focus on Hungary: Refugees, Asylum and Migration*. Prague: Heinrich-Boll-Stiftung, 2015.

pengungsi tersebut, tetapi kenyataannya Perjanjian Dublin tidak dapat mencegah Hungaria untuk menutup akses masuk pengungsi ke dalam wilayahnya, hal tersebut juga disebabkan konflik yang terus berkecamuk di kawasan Suriah turut menyumbang dengan signifikan terhadap besarnya arus pengungsi yang mencari suaka ke kawasan sekitarnya. Terhitung sejak awal tahun 2015 jumlah pengungsi dan migran asal Suriah yang masuk ke kawasan Eropa mencapai angka 1.032.408.<sup>12</sup> Pada tahun 2016 jumlah pengungsi asal Suriah yang telah berada di wilayah Eropa mencapai angka 5.2 juta.<sup>13</sup>

Hal tersebut menyebabkan beberapa negara di kawasan Eropa mulai memperketat regulasi terhadap pengungsi dan migran, sehingga membuat para pengungsi yang telah masuk ke kawasan Eropa kebingungan dan terlantar, sebagian besar pengungsi yang telah berhasil mendapatkan suaka juga tidak mendapatkan perhatian dan para migran dari Suriah juga mendapat perlakuan yang kurang baik, akibat sentimen yang terbangun antara pengungsi dan migran dengan penduduk lokal, dalam arti yang sempit fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai katalis yang menyebabkan fenomena krisis di kawasan Eropa.

Pergolakan konflik yang masih terus berlanjut di kawasan Timur Tengah menyebabkan masyarakat di wilayah-wilayah konflik terparah seperti Suriah dan Yaman harus melarikan diri dari kampung halamannya untuk mencari perlindungan di negara-negara lain sebagai pengungsi, dengan harapan untuk mendapatkan

---

<sup>12</sup> UNHCR (2015). *Operational Refugee Situations: Mediterranean Situation*. <https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean>

<sup>13</sup> UNHCR (2016). *Refugee Crisis in Europe: Aid, Statistics and News*. <https://www.unrefugees.org/emergencies/refugee-crisis-in-europe/>

kehidupan yang lebih baik. Negara-negara di kawasan Eropa telah menjadi “surga suaka” bagi para pengungsi asal Suriah untuk mendapatkan kehidupan baru yang jauh dari konflik, negara seperti Jerman dan Italia menjadi tujuan paling banyak bagi para pengungsi. Merujuk hasil survey dari World Data, Jerman merupakan destinasi pengungsi tertinggi kedua di dunia dengan jumlah pengungsi mencapai angka 750.000 pada tahun 2016.<sup>14</sup>

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah, bahkan jika para pengungsi dari Suriah berhasil masuk ke kawasan Eropa, para pengungsi masih belum dapat mendapatkan kehidupan seperti apa yang mereka harapkan di negara seperti Jerman dan Italia, sebagian besar pengungsi harus mengalami berbagai macam bentuk perlakuan dan kondisi seperti tindakan represif dari negara-negara seperti Turki, Yunani, Serbia dan Hungaria yang harus mereka lalui untuk sampai ke Jerman dan Italia.<sup>15</sup> Merujuk pada hasil penelitian mengenai kekerasan yang terjadi terhadap populasi pengungsi perempuan di Serbia yang dilakukan oleh *Atina - Citizens' Association for combating trafficking in human beings and all forms of violence against women* dan *United Nations Population Fund (UNFPA)* menunjukkan bahwa 64,8 persen mengalami bentuk kekerasan fisik, 24 persen mengalami kekerasan seksual, dan 55,5 persen sering menyaksikan bentuk kekerasan terjadi terhadap sesama pengungsi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> World Data (2018), “*Asylum Applications and Refugees in Germany*”, <https://www.worlddata.info/europe/germany/asylum.php>

<sup>15</sup> Sari, A. P., *Eropa Tanah yang Menjanjikan bagi Imigran*, CNN, (2015), internet, <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150908205805-134-77474/eropa-tanah-yang-menjanjikan-kesejahteraan-bagi-imigran/>

<sup>16</sup> Jelena Hrnjak dan Marija Cvejic, *Violence Against Women and Girls Among Refugee and Migrant Population in Serbia*, (Belgrade: Atina, 2017) h. 13-18

Latar belakang diatas, menunjukkan pentingnya fenomena ini untuk diteliti. Peneliti bermaksud untuk menganalisis kebijakan Hungaria yang begitu keras terhadap pengungsi. Hal ini menjadi penting karena kebijakan Hungaria terhadap pengungsi merupakan sebuah anomali dimana Hungaria merupakan pihak yang meratifikasi Konvensi 1951 seharusnya memberikan perlindungan dan hak-hak yang dimiliki oleh para pengungsi, sebaliknya kebijakan Hungaria yang menempatkan pengungsi sebagai sebuah fenomena yang mengancam keamanan nasionalnya sehingga memerlukan penanganan khusus dapat menjadi efek domino terhadap negara-negara lain di kawasan Eropa, terkait bagaimana negara-negara dalam memperlakukan pengungsi selayaknya sebagai sebuah ancaman darurat sehingga memerlukan penanganan yang khusus. Maka dari itu, peneliti membuat tesis dengan judul “Sekuritisasi Hungaria Terhadap Isu Krisis Pengungsi Asal Suriah Sebagai Ancaman Keamanan Nasional Hungaria Tahun 2015-2018”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Masalah dalam penelitian ini terdapat pada kebijakan Hungaria dalam menghadapi krisis pengungsi yang disebabkan oleh arus pengungsi yang tinggi asal Suriah, dimana kebijakan yang diterapkan Hungaria terhadap para pengungsi tidak sejalan dengan Konvensi 1951. Sikap Uni Eropa yang mewajibkan negara-negara anggotanya untuk terbuka terhadap pengungsi sesuai dengan Perjanjian Dublin tidak digubris dan ditolak keras oleh Hungaria, dibuktikan dengan implementasi kebijakan anti-pengungsi Hungaria terhadap para pengungsi, pemerintah Hungaria menggambarkan para pengungsi sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan nasional, pemerintah Hungaria berupaya menunjukkan pengungsi sebagai sebuah

ancaman terhadap kehidupan sosial dan keamanan masyarakatnya. Kebijakan Hungaria terhadap para pengungsi asal Suriah menjadi sangat penting terlebih lagi apabila diasosiasikan dengan fenomena krisis pengungsi yang terjadi di Eropa.

Hungaria dibawah kepemimpinan Viktor Orban mulai mengalami titik balik perubahan sikap terhadap pengungsi asal Suriah yang membanjiri wilayah Eropa. Selama tahun 2015-2016 pemerintah Hungaria telah menggelontorkan dana sebesar 28 juta euro untuk kampanye anti-migran dan pengungsi, pemerintah Hungaria menyerukan masyarakatnya untuk mendukung nilai-nilai Kristiani dan identitas nasional Hungaria dalam mencegah Hungaria menjadi sarang bagi para teroris.<sup>17</sup>

Meskipun tujuan dari pengungsi yang memasuki wilayah Hungaria adalah sebagai negara transit untuk selanjutnya pergi ke negara lain di wilayah Eropa, pemerintah Hungaria memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan pada bulan September 2015 mengamandemen undang-undang kriminalnya terkait tindakan kriminal melakukan penyeberangan tidak sah dari penutupan perbatasan (pagar), merusak penutupan perbatasan, dan penghambatan pekerjaan konstruksi terkait dengan penutupan perbatasan yang dapat dihukum tiga hingga sepuluh tahun penjara.<sup>18</sup>

Perdana Menteri Viktor Orban yang berasal dari partai nasionalis juga menjadi faktor pendorong Hungaria menolak keras masuknya pengungsi ke dalam wilayah Hungaria. Viktor Orban secara terang-terangan mendeklarasikan sikap

---

<sup>17</sup> Elzbieta M. Goździak, 2019, "Using Fear of the "Other," Orbán Reshapes Migration Policy in a Hungary Built on Cultural Diversity", Migration Policy Institute, <https://www.migrationpolicy.org/article/orban-reshapes-migration-policy-hungary>

<sup>18</sup> Ibid

Hungaria yang cenderung anti-migran dan pengungsi. Merujuk *press release* yang dipublikasikan oleh Bild yang merupakan laman berita asal Jerman, dalam wawancaranya yang dilakukan dengan Bild, Viktor Orban mengatakan “*We don’t see these people as Muslim refugees. We see them as Muslim invaders*” dan Viktor Orban juga memiliki pandangan yang skeptis terkait bagaimana Uni Eropa menangani krisis pengungsi, terlebih lagi Viktor Orban memiliki sentimen terhadap Kanselir Jerman Angela Merkel yang terus menekan Uni Eropa untuk menerima masuk pengungsi, Viktor Orban dalam wawancaranya dengan Bild mengatakan “*When it comes to the question of who can live in Hungary, Merkel is not the one in charge*”.<sup>19</sup>

Sikap Viktor Orban yang menyatakan bahwa “*If you come to Hungary, you must respect Hungarian culture!*”<sup>20</sup> bukan tanpa adanya dukungan, karena pemerintahan Hungaria memang telah mengalami titik balik perubahan rezim ke arah yang berkarakteristik di dominasi partai ultra-kanan, hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Zoltan Kovac selaku Juru Bicara pemerintah Hungaria yang mengatakan “*Migration is not human right, and illegal migration is a risk. It carries dangers to public security, the danger of terrorism, and eventually the danger of cultural conflicts, which we see now in western Europe*”.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara Bild dengan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, ed. Orla Barry, 2019, “*Orban’s Enemies: In Orbán’s Hungary, refugees are unwelcome — so are those who try to help*”, The World, <https://www.pri.org/stories/2019-02-11/orban-s-hungary-refugees-are-unwelcome-so-are-those-who-try-help>

<sup>20</sup> Elisabeth Zerofsky, 2019, “*Viktor Orban’s Far-Right Vision for Europe*”, The New Yorker, <https://www.newyorker.com/magazine/2019/01/14/viktor-orbans-far-right-vision-for-europe>

<sup>21</sup> Hasil wawancara Bild dengan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Op. Cit.

Hungaria bukan satu-satunya negara di Eropa yang menerapkan kebijakan keras terhadap pengungsi dalam menghadapi fenomena krisis pengungsi yang terjadi pada tahun 2015, negara-negara seperti Republik Ceko dan Polandia juga menerapkan kebijakan yang keras terhadap pengungsi.<sup>22</sup> Tindakan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dalam menghadapi pengungsi didasari pada kondisi arus pengungsi yang membanjiri kawasan Eropa, pada tahun 2017 jumlah pengungsi yang datang ke wilayah Eropa mencapai angka 172.300, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti Jerman yang menerapkan kebijakan pintu terbuka untuk para pengungsi,<sup>23</sup> Jerman merupakan negara termaju di Eropa dalam hal menerima pengungsi masuk ke negaranya, pada penghujung tahun 2018, terdapat 1.6 juta pengungsi yang ada di Jerman, merujuk data dari UNHCR Jerman merupakan negara industri yang merupakan negara penerima pengungsi tertinggi di dunia.<sup>24</sup>

Dampak yang paling signifikan adalah melejitnya kepopuleran partai-partai ultra-kanan, yang memanfaatkan isu krisis pengungsi dengan menempatkan para pengungsi sebagai sebuah ancaman bagi masyarakat lokal di masing-masing negara, tidak terkecuali Hungaria.<sup>25</sup> Permasalahan yang dihadapi oleh Hungaria

---

<sup>22</sup> James Kanter, *E.U. Moves Against 3 Countries That Don't Take Refugees*, The New York Times, (2020), online, internet, 6 Agustus 2020, <https://www.nytimes.com/2017/06/13/world/europe/eu-refugees-czech-republic-hungary-poland.html>

<sup>23</sup> Human Rights Watch, *World Report 2019: European Union*, Human Rights Watch Org., (2019), 6 Agustus 2020, internet, <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/european-union>

<sup>24</sup> Marion MacGregor, *Germany: Refugee Numbers in Context*, Info Migrants, (2019), internet, 6 Agustus 2020, <https://www.infomigrants.net/en/post/17641/germany-refugee-numbers-in-context#:~:text=The%20UN's%20new%20Global%20Trends,Pakistan%2C%20Uganda%2C%20and%20Sudan.>

<sup>25</sup> Gouri Sharma, *Angela Merkel's Mixed Legacy: Open-door Policy, Rise of Far Right*, Aljazeera, (2018), internet, 6 Agustus 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2018/12/angela-merkel-mixed-legacy-open-door-policy-rise-181208085144548.html>

adalah pengaruh dan kekuatan partai *FIDESZ* menjadi semakin kuat sejalan dengan arus pengungsi yang mulai membanjiri Hungaria. Kebangkitan partai *FIDESZ* di Hungaria ditandai dengan kembali terpilihnya Viktor Orban sebagai Perdana Menteri Hungaria pada tahun 2014, setelah sebelumnya menjabat di posisi yang sama pada tahun 2010. Viktor Orban dikenal sebagai politisi dari partai *FIDESZ* yang beraliran ultra-kanan dengan kampanye kebijakannya yang cenderung anti-islam dan menentang keras para imigran dan pengungsi asal Suriah untuk masuk ke dalam wilayah Hungaria dengan memanfaatkan krisis pengungsi,<sup>26</sup>

Berdasarkan pemaparan identifikasi Masalah diatas, terdapat tiga fenomena yang menarik dan penting dalam penelitian ini:

1. Krisis pengungsi yang terjadi di wilayah Eropa menyebabkan isu pengungsi menjadi sebuah ancaman terhadap keamanan nasional Hungaria.
2. Hungaria sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951 malah memperlakukan pengungsi sebagai sebuah ancaman, melalui kebijakan-kebijakan yang berbanding terbalik dengan apa yang ada dalam Konvensi 1951, seperti menutup perbatasan untuk para pengungsi dan merumuskan kebijakan represif terhadap pengungsi.
3. Perjanjian Dublin merupakan peraturan yang isinya adalah bahwa negara anggota Uni Eropa yang menjadi tujuan pengungsi bertanggung jawab untuk proses suaka para pengungsi tersebut, tetapi hal tersebut tidak sejalan

---

<sup>26</sup> Benkova, Livia. 2017. *Europe`s Response to the Migration Crisis*. AIES: Hainburg.

dengan sikap Hungaria yang menolak akses masuk bagi para pengungsi ke dalam wilayahnya baik itu sebagai transit atau tujuan.

### **1.3 Fokus Masalah**

#### **1.3.1 Pembatasan Waktu**

Dalam segi pembatasan waktu, peneliti menetapkan jangkauan waktu atau batasan Masalah pada tahun 2015-2018, peneliti mengidentifikasi bahwa pada tahun 2015 merupakan periode awal terjadinya krisis pengungsi di Eropa. Keberadaan pengungsi yang membanjiri negara Eropa, membuat negara seperti Hungaria menutup perbatasannya terhadap pengungsi dan mendorong terbentuknya sentimen anti-imigran dan pengungsi. Pada tahun 2018 merupakan puncak dari akibat krisis pengungsi menyebabkan munculnya sentimen anti-imigran dan pengungsi yang disebabkan oleh partai-partai ultra-kanan di negara-negara Eropa mem-*framing* pengungsi sebagai sebuah ancaman dengan tujuan untuk mendulang suara, tidak terkecuali Hungaria. Peristiwa tersebut menjadi justifikasi urgensi terkait identifikasi waktu dalam penelitian ini, karena pada periode tersebut peneliti dapat melihat katalis yang menjadi landasan perancangan dan pengejawantahan kebijakan Hungaria terhadap para pengungsi asal Suriah.

#### **1.3.2 Pembatasan Bidang**

Peneliti membatasi pembahasan penelitian ini pada dua unit utama, yaitu: aktor dalam penelitian ini adalah pemerintah Hungaria, partai *FIDESZ* dan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban sebagai *securitizing actors* yang melakukan sekritisasi terhadap isu pengungsi asal Suriah dalam upaya untuk menunjukkan kepada *referent object*, dalam penelitian ini adalah masyarakat Hungaria bahwa

pengungsi asal Suriah merupakan sebuah ancaman terhadap keamanan nasional Hungaria. Kemudian isu dalam penelitian ini adalah sekuritisasi Hungaria terhadap isu krisis pengungsi, khususnya pengungsi asal Suriah. Teori sekuritisasi dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti ketika akan menganalisis bagaimana isu pengungsi dapat terkonstruksi secara sosial menjadi sebuah ancaman dalam konteks Hungaria, melalui proses *speech act* yang dilakukan oleh *securitizing actor* yaitu pemerintah Hungaria, partai *FIDESZ* dan Perdana Menteri Viktor Orban dalam menunjukkan kepada *referent object*, dalam penelitian ini adalah masyarakat Hungaria bahwa pengungsi asal Suriah merupakan isu yang mengancam keamanan nasional *referent object* yaitu masyarakat Hungaria sehingga menjadi justifikasi bahwa tindakan luar biasa harus diambil dalam menangani ancaman tersebut.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Mengacu kepada identifikasi Masalah dan berdasarkan penjelasan yang telah peneliti utarakan, maka Masalah yang peneliti rumuskan adalah sebagai berikut; **Bagaimana Pemerintah Hungaria Melakukan Sekuritisasi Terhadap Pengungsi Asal Suriah Sebagai Ancaman Keamanan Nasional Pada Tahun 2015-2018?**

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengapa pemerintah Hungaria sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951 tidak memenuhi hak dan kewajibannya bagi/terhadap pengungsi asal Suriah, dan sebaliknya Hungaria membangun wacana bahwa pengungsi merupakan sebuah ancaman. Penelitian ini

juga bertujuan untuk menemukan makna atau pemahaman baru dari fenomena mengapa Hungaria melakukan sekuritisasi isu pengungsi asal Suriah sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan nasionalnya.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para penstudi dan peneliti bidang studi hubungan internasional, khususnya yang mendalami mengenai sekuritisasi dan kajian keamanan mengenai isu pengungsi secara lebih lanjut dan dalam kerangka studi kasus yang berbeda. Penelitian ini juga menawarkan informasi terkait analisis mengenai teori sekuritisasi terhadap kajian isu keamanan non-tradisional.

### **1.7 Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan empat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan peneliti anggap relevan terkait isu krisis pengungsi di wilayah Eropa, dengan tujuan agar peneliti mendapatkan pijakan dalam menganalisis fenomena sekuritisasi isu krisis pengungsi yang terjadi di Eropa dalam konteks kebijakan Hungaria terhadap pengungsi asal Suriah dan sebagai justifikasi bahwa fenomena yang peneliti angkat menjadi topik masih memiliki nilai relevansi untuk menjadi sebuah penelitian.

Tinjaun pustaka pertama dalam penelitian ini berjudul *Securitization and Desecuritization of Migration in Indonesia: Its Implication to Refugee Rights in the Southeast Asian Region*.<sup>27</sup> Penelitian ini memfokuskan pembahasan untuk

---

<sup>27</sup> Nurul A. Zayda, Maiza H. Ash-Shafikh, dan Ayusia S. Kusuma, 2019, *Securitization and Desecuritization of Migration in Indonesia: Its Implication to Refugee Rights in the Southeast Asian Region*, *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 3(1) h. 81-100.

memahami hubungan antara sekuritisasi terhadap pengungsi dan migran yang dilakukan oleh Indonesia dalam konteks kawasan regional Asia Tenggara. Dalam menganalisis bagaimana sekuritisasi pengungsi dan migran saling berkaitan penelitian ini menekankan analisis yang mendalam terhadap kebijakan-kebijakan, sikap pemerintah dan persepsi masyarakat Indonesia dalam mengidentifikasi retorika utama terkait mobilisasi migran dan mobilisasi pengungsi.

Kesamaan tulisan ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah fokus utama dari tulisan ini yang berusaha untuk memaknai bagaimana proses sekuritisasi dilakukan, dalam kondisi apa dan syarat-syarat apa yang harus terpenuhi agar sekuritisasi dapat berhasil, dalam konteks tulisan ini, penekanan utama dalam tulisan ini keterkaitan *securitization actors*, *speech act*, dan *referent object*. Tulisan ini menjelaskan secara rinci proses sekuritisasi migran dan pengungsi dilakukan oleh Indonesia dengan melihat kebijakan-kebijakan dan *speech act* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Peneliti melihat kelebihan dari tulisan ini adalah pembahasan tidak selesai hanya di proses sekuritisasi terhadap migran saja, meskipun telah dijelaskan dengan komprehensif bagaimana regulasi dan tindakan Indonesia terhadap migran, tulisan ini juga menjelaskan bagaimana dampak dari sekuritisasi dapat menyebabkan proses desekuritisasi dengan melihat keterlibatan masyarakat Indonesia dalam mempersepsikan *speech act* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Sedangkan perbedaan yang signifikan tulisan ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang diteliti menekankan subjek yang disekuritisasi adalah pengungsi asal Suriah, dan fenomena yang diangkat dalam penelitian ini

adalah kebijakan Hungaria terhadap pengungsi. Penelitian yang sedang diteliti lebih menekankan terhadap bagaimana proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Hungaria terhadap pengungsi asal Suriah dengan tujuan untuk memahami mengapa Hungaria mengkonstruksi isu pengungsi sebagai sebuah ancaman dalam konteks wilayah Hungaria. Sedangkan tulisan ini lebih menekankan terhadap pemahaman dalam memaknai hubungan antara sekuritisasi migran dan perlindungan pengungsi oleh pemerintah Indonesia dalam konteks kawasan Asia Tenggara.

Penelitian kedua yang menjadi tinjauan pustaka berjudul *Refugees, not Economic Migrants – Why do Asylum Seekers Register in Hungary*.<sup>28</sup> Penelitian ini ditulis oleh Andras Tetenyi, Tamas Barczikay dan Balazs Szent-Ivanyi, para penulis tersebut ini memiliki fokus dalam isu-isu seperti krisis migrasi, marginalisasi dan depolitisasi. Tulisan ini memiliki fokus pada isu-isu pihak-pihak pencari suaka, terutama mereka yang ditahan (tertahan) di Hungaria. Penelitian yang telah dihasilkan oleh para penulis diatas tersebut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peneliti lain yang tertarik pada pertanyaan terkait mengapa para pengungsi memilih Hungaria sebagai pintu masuk ke wilayah Uni Eropa.

Tulisan ini menganalisis mengapa pencari suaka memilih Hungaria sebagai pintu masuk ke Uni Eropa. Diantara negara-negara Eropa Tengah dan Timur Hungaria sejauh ini menjadi pilihan paling populer bagi pencari suaka sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2016, tetapi yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini adalah, fakta bahwa Hungaria menjadi tujuan populer bagi pencari suaka sebagai

---

<sup>28</sup> Andras Tetenyi, Tamas Barczikay dan Balazs Szent-Ivanyi. (2018). “Refugees, not Economic Migrants - Why do Asylum-Seekers Register in Hungary?”, *International Migration*, h.1-18.

jalan dalam memasuki wilayah Uni Eropa diabaikan oleh literatur yang ada. Tulisan ini menggunakan kumpulan data panel dan *fixed effects regressions*, tulisan ini menemukan bahwa selain “berlokasi” di rute migrasi Balkan, variabel yang terkait dengan kebijakan imigrasi Hungaria adalah penentu paling signifikan dari pilihan pencari suaka. Tulisan ini tidak menemukan bukti untuk mendukung klaim yang dikeluarkan oleh pemerintah Hungaria bahwa para pengungsi yang datang ke Hungaria sebenarnya adalah migran ekonomi dan bukan pencari suaka. Sebaliknya, hasil penelitian dari tulisan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pencari suaka yang memasuki Hungaria adalah masyarakat yang melarikan diri dari konflik kekerasan di negara asalnya.

Tulisan ini telah sangat baik dalam menjelaskan mengapa Hungaria merupakan negara yang menjadi tujuan populer dari para pengungsi sebagai pintu gerbang dalam memasuki wilayah Uni Eropa. Tetapi, tulisan tersebut lebih memfokuskan pada persoalan *push factors* dan *pull factors* terkait bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pilihan pengungsi untuk memilih jalur Hungaria sebagai pintu masuk ke dalam wilayah Uni Eropa. sementara itu, tulisan ini tidak terlalu memperhatikan fakta bahwa Hungaria telah mengkonstruksi kondisi adanya krisis pengungsi di wilayah Hungaria dan bagaimana dinamika politik yang terjadi dalam menciptakan konstruksi tersebut. Kelebihan dalam tulisan tersebut adalah analisa yang disajikan telah menangkap bagaimana faktor-faktor pendorong dan penarik dari berbagai aspek seperti ekonomi, politik, dan budaya menjadi aspek yang secara signifikan dalam pertimbangan mengapa pencari suaka memilih Hungaria sebagai pintu gerbang ke wilayah Uni Eropa.

Tinjauan pustaka yang ketiga berjudul *Radical Right-Wing Politics and Migrants and Refugees in Hungary*.<sup>29</sup> Tulisan ini memberikan peneliti gambaran mengenai dinamika partai ultra-kanan dalam konteks krisis pengungsi yang terjadi di Eropa. Popularitas partai-partai ultra-kanan di Eropa, khususnya di Hungaria telah mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan isu pengungsi dan migran yang membanjiri wilayah Eropa. Ditulis oleh Onvara Vadhanavisala yang dipublikasikan oleh *European Journal of Social Sciences*, penelitian tersebut menjelaskan dengan jelas bagaimana partai ultra-kanan di Hungaria mengalami pertumbuhan popularitas dengan signifikan sejalan dengan terpilihnya Viktor Orban sebagai perdana menteri.

Onvara Vadhanavisala mendefinisikan dengan jelas bahwa popularitas partai ultra-kanan di Hungaria memiliki keterkaitan dengan isu pengungsi yang membanjiri wilayah Eropa sejak tahun 2015. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah fokus dari tulisan ini adalah pembahasan secara mendalam mengenai pola-pola yang dilakukan partai ultra-kanan dalam memanfaatkan isu krisis pengungsi dan mengkritisi kebijakan Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi untuk menaikkan popularitasnya. Kelebihan dari tulisan ini adalah memberikan gambaran dalam menjelaskan bagaimana krisis pengungsi di Eropa menjadi katalis bagi partai ultra-kanan di Hungaria dalam mendulang popularitas dengan menggunakan isu pengungsi. Tetapi pembahasan yang terlalu sentris dalam mengeksplorasi perkembangan dan dinamika partai ultra-

---

<sup>29</sup> Vadhanavisala, Onvara. 2019. *Radical Right-Wing Politics and Migrants and Refugees in Hungary*, *European Journal of Social Sciences*, Vol. 2 No. 3 (Desember) h. 100-108.

kanan di Hungaria membuat kurangnya kontribusi tulisan ini dalam membantu peneliti melihat bagaimana isu pengungsi dapat dikonstruksi menjadi sebuah fenomena yang memerlukan penanganan yang luar biasa agar mampu disekuritisasi ke dalam isu keamanan.

Tinjauan pustaka keempat, ditulis oleh Aldoreza Pradana dengan judul *Identitas Nasional: Penggunaan Politik Identitas dalam Gelombang Pengungsi 2015 di Hungaria*.<sup>30</sup> Tulisan ini merupakan salah satu penelitian dipublikasikan oleh *ISS Brief Issue* pada tahun 2018. Tulisan ini dengan komprehensif telah menjelaskan bagaimana penggunaan politik identitas semakin menguat sejalan dengan isu krisis pengungsi yang terjadi di Eropa pada tahun 2015. Dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci bagaimana transformasi politik identitas di Eropa, khususnya di Hungaria pasca peraturan Dublin mewajibkan negara-negara Uni Eropa untuk mencatat para pengungsi yang masuk pertama disinggahi, bersamaan dengan hal tersebut dibebankan juga tanggung jawab untuk mengurus pengungsi tersebut. Hal tersebut mendapatkan penolakan keras dari Hungaria dan membuat pemerintah Hungaria menggunakan politik identitas dalam menolak masuknya para pengungsi.

Persamaan tulisan ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah analisis bagaimana Hungaria membangun narasi yang menempatkan isu pengungsi ke dalam ranah isu keamanan sehingga Hungaria menjustifikasi tindakan yang menjadikan pengungsi asal Suriah sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, tetapi dalam tulisan tersebut lebih menekankan pada analisis bagaimana Hungaria

---

<sup>30</sup> Pradana, Aldoreza. 2018. *Identitas Nasional: Penggunaan Politik Identitas dalam Gelombang Pengungsi 2015 di Hungaria*. *ISS Brief Issue* 03. h. 1-10, diakses dari <https://simpan.ugm.ac.id/s/uZRcLR2J2QrtJqV#pdfviewer>

dalam menggunakan politik identitas untuk membenturkan para pengungsi dengan masyarakat Hungaria. Analisis dari tulisan ini hanya membahas penggunaan politik identitas dan tidak dengan rinci mengarah pada pembahasan mengenai mengapa atau bagaimana proses sekuritisasi isu pengungsi dikontekstualisasikan ke dalam *speech act* yang digunakan oleh *securitizing actor*.

Berdasarkan pemaparan tinjauan pustaka diatas, peneliti mengidentifikasi bahwa penelitian yang sedang diteliti ini nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap kajian keamanan non-tradisional, khususnya terkait teori sekuritisasi sebuah isu yang dalam konteks ini adalah isu pengungsi, dalam hal memberikan indikator-indikator bagaimana sebuah isu dapat menjadi ancaman dan menggambarkan bagaimana proses sekuritisasi berlangsung dengan studi kasus kebijakan Hungaria terhadap pengungsi asal Suriah.

### **1.8 Kerangka Pemikiran**

Sebagai landasan dalam melakukan analisa dan menjawab perumusan Masalah: Mengapa Hungaria Menjadikan Pengungsi Asal Suriah Sebagai Ancaman? Maka peneliti menyusun seperangkat kerangka teoritis yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Konstruktivisme, teori yang digunakan adalah Teori Sekuritisasi, konsep yang digunakan adalah konsep ancaman, konsep Keamanan Non-Tradisional, konsep Pengungsi, konsep Politik Identitas dan konsep Kepentingan Nasional.

### 1.8.1 Pendekatan Konstruktivisme

Pendekatan konstruktivisme lahir atas dasar jawaban dari kompleksitas politik internasional kontemporer yang mulai sulit untuk dijelaskan menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat konservatif. Merujuk pada Alexander Wendt (1992) menjelaskan bahwa konstruktivisme menekankan pentingnya kesamaan nilai dan minat diantara individu yang saling berinteraksi dalam panggung global. Wendt juga menjelaskan mengenai hubungan antara aktor (individu) dan struktur (seperti negara) sebagai satu kesatuan dimana konteks struktur tidak hanya dapat membatasi para aktor tetapi juga dapat mengkonstruksi identitas aktor.<sup>31</sup> Konstruktivisme dapat memberikan kerangka terhadap fenomena yang diteliti terkait dengan aspek isu, aktor dan interaksi yang berlangsung.

Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan kontemporer yang relevan dalam menjelaskan sebuah perubahan dalam konstruksi konstelasi fenomena global.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, hal yang akan ditemukan adalah dengan adanya krisis pengungsi di wilayah Eropa, Hungaria dalam rezim Viktor Orban mulai mengasosiasikan pengungsi sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan nasional Hungaria. Melalui pendekatan konstruktivisme, maka dapat terekam dengan jelas hubungan yang terkonstruksi antara Hungaria dengan pengungsi asal Suriah dalam konteks mengapa Hungaria menjadikan pengungsi sebagai ancaman. Ancaman yang dimaksud dapat bermakna dua hal yang komprehensif. Hal pertama bahwa konstelasi politik global kontemporer dalam hal ini krisis pengungsi dapat

---

<sup>31</sup> Wendt, Alexander. (1992) "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics", *International Organization* 46(2): 391–425.

<sup>32</sup> K. M. Fierke, *Constructivism, International Relations Theory: Discipline and Diversity*, ed. Tim Dunne, Milja Kurki dan Steve Smith (New York: Oxford University Press, 2007) h. 189.

menjadi katalis yang mendorong perubahan perilaku negara-negara Eropa terhadap pengungsi menjadi semakin terbuka terhadap pengungsi, atau bahkan sebaliknya, dalam konteks ini perilaku Hungaria yang menjadikan pengungsi sebagai sebuah ancaman.<sup>33</sup>

Dalam pengaplikasiannya, dimensi yang ditekankan dalam konstruktivisme adalah norma, aturan dan bahasa.<sup>34</sup> Hal ini tentu tepat jika dikontekstualisasikan dengan fenomena Hungaria yang mensekritisasi pengungsi asal Suriah, merujuk pada Bob S. Hadiwinata (2007) yang menyatakan bahwa Hungaria menjadikan pengungsi sebagai sebuah ancaman tidak selalu ditentukan oleh alasan atau motif melainkan lebih kepada proses konstruksi sosial yang terbentuk dari interaksi-interaksi yang bersifat intersubjektif dalam ruang lingkup sosial, politik, ekonomi, dan budaya.<sup>35</sup> Konstruktivisme juga menekankan pada intersubjektivitas, bahwa realitas politik internasional merupakan akumulasi yang dibentuk atau dihasilkan dari interaksi antar aktor-aktor.<sup>36</sup> Sehingga analisis terhadap proses interaksi antar aktornya menjadi penting, dalam bagian fokus Masalah telah dijelaskan bahwa interaksi aktor yang dimaksud adalah berupa kebijakan Hungaria mensekritisasi pengungsi asal Suriah.

Oleh karena itu dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme maka keperluan peneliti untuk melihat interaksi antar aktor-aktor yang dalam konteks ini

---

<sup>33</sup> Ibid., h. 195

<sup>34</sup> Ibid., h. 189

<sup>35</sup> Hadiwinata, Bob Sugeng, "Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: dari Realisme hingga Konstruktivisme". Dalam Yulius P. Hermawan (2007). Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi. Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 20-21.

<sup>36</sup> Nicholas G. Onuf, *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations*, South Carolina: University of South Carolina Press, 1989.

adalah Hungaria dengan pengungsi asal Suriah dapat terakomodir, karena poin utama dalam konstruktivisme adalah perubahan, sosialitas, dan proses interaksi dimana kesemuanya itu membentuk suatu pola hubungan intersubjektif.<sup>37</sup> Konstruktivisme memberikan ruang yang sangat terbuka terhadap aktor non-negara dalam konteks ini adalah pengungsi untuk menjadi sebuah ancaman terhadap stabilitas dan keamanan nasional Hungaria ketika terjadi krisis pengungsi di Eropa tahun 2015. Studi mengenai isu pengungsi yang dikonstruksi sebagai sebagai sebuah ancaman keamanan dapat diklasifikasikan sebagai studi tentang analisis sekuritisasi isu-isu keamanan non-tradisional.

Pembahasan mengenai isu pengungsi dapat menjadi mudah dan terarah jika menggunakan pendekatan konstruktivisme, terlebih jika dikaitkan dengan substansi penelitian yang diteliti. Jika mengkontekstualisasikan konstruktivisme dengan isu pengungsi, maka salah satu gagasan yang muncul adalah terkait dengan bagaimana negara yang merasa terancam secara langsung melakukan sebuah upaya untuk mendeklarasikan perang terhadap pengungsi.<sup>38</sup> Dalam kerangka berpikir konstruktivisme, deklarasi perang terhadap pengungsi adalah bentuk dari interaksi sosial dalam sebuah situasi yang sedang terancam atau darurat. Dalam konteks penelitian ini, konsep perang terhadap pengungsi memang tidak terjadi seperti apa yang terjadi dengan fenomena perang melawan terorisme. Penelitian ini cenderung lebih melihat konsep perang terhadap pengungsi dari sudut pandang atau bentuk

---

<sup>37</sup> K. M. Fierke, *Op. Cit.*, h. 180

<sup>38</sup> *Ibid.*, h.190

kolektif aktor-aktor di Hungaria yang berbasis upaya mem-*framing* pengungsi sebagai sebuah ancaman yang bersifat darurat melalui konsep sekuritisasi.

Pada akhirnya interaksi antar aktor-aktor di Hungaria dalam memberikan respon terhadap pengungsi asal Suriah akan menghasilkan sebuah realita yang digambarkan oleh hubungan antar aktor tersebut. realita tersebut bersifat multidimensional yang akan dianalisa lebih mendalam dalam penelitian ini.<sup>39</sup> Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme sebagai pendekatan dalam menganalisis berbagai fenomena yang terjadi, karena pendekatan terdapat kecocokan dengan fenomena dan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

### **1.8.2 Teori Sekuritisasi**

Teori sekuritisasi merupakan teori yang dikembangkan oleh *Copenhagen School*, sama halnya dengan Konstruktivisme yang menekankan pentingnya interaksi subjektif yang dapat mengkonstruksi sebuah fenomena, teori sekuritisasi juga berangkat dari konstruksi sebuah isu yang bukan merupakan isu keamanan menjadi sebuah isu keamanan dengan cara proses interaksi subjektif secara sosial dan politik. Perkembangan yang terjadi dalam studi hubungan internasional membawa perubahan dalam memahami permasalahan dalam kajian keamanan yang saat ini tidak lagi difokuskan pada isu militer tetapi juga isu yang bersifat non-militer.

---

<sup>39</sup> Ibid., h. 192

Meskipun isu keamanan yang bersifat non-militer tidak secara langsung menjadi ancaman terhadap entitas negara, tetapi hal tersebut menjadi ancaman langsung dalam level individu.<sup>40</sup> Fenomena tersebut membawa kita untuk memahami keamanan dalam sudut pandang secara subjektif, kondisi tersebut didasarkan pada isu-isu baru seperti isu kemiskinan, isu keamanan pangan, lingkungan, energi, migrasi dan perpindahan individu, konflik sosial yang bersifat ras dan kelompok yang mengancam individu secara langsung dan harus menjadi perhatian, karena isu-isu tersebut dapat muncul akibat dari adanya proses sekuritisasi.

Dalam penelitian ini, sekuritisasi dipahami sebagai sebuah pemikiran atau pandangan dimana keamanan tidak lagi menjadi sesuatu yang bersifat objektif, melainkan intersubjektif. Merujuk pada Barry Buzan et al. (1998) menjelaskan bahwa teori sekuritisasi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman terkait siapa aktor-aktor yang melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu (ancaman) tertentu, kemudian siapa yang terancam, mengapa, hasilnya dan dalam kondisi apa proses sekuritisasi dapat terjadi dan berhasil. Maka dari itu, analisis sekuritisasi mencakup tiga tipe unit, yaitu: *referent object, securitizing actor and functional actor*.<sup>41</sup>

Ketiga unit analisis tersebut adalah proses terjadinya sekuritisasi, dimana *referent object* adalah aktor-aktor yang eksistensialnya terancam dan memiliki legitimasi untuk bertahan hidup atau mempertahankan eksistensinya, aktor yang

---

<sup>40</sup> Mely Caballero-Anthony, *Understanding Non-Traditional Security, An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach*, ed. Mely Caballero-Anthony (London: SAGE Publications Ltd, 2016) h. 2-5.

<sup>41</sup> Buzan et al., Op. Cit., h. 32

harus terancam tidak harus selalu negara. *Securitizing actor* adalah aktor-aktor yang mensekuritisasi isu tertentu dengan melakukan deklarasi menggunakan *speech act* bahwa *referent object* berada dalam ancaman atau terancam oleh sebuah isu. Aktor-aktor tersebut dapat berupa politisi, pemimpin partai atau pemerintahan, para birokrat, aparatur pemerintah, dan kelompok penekan. Sementara *functional actor* adalah aktor-aktor yang digambarkan melalui *speech act* oleh *securitizing actor* kepada *referent object* bahwa aktor atau aktor dalam isu tertentu merupakan sebuah ancaman, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam penanganannya.<sup>42</sup>

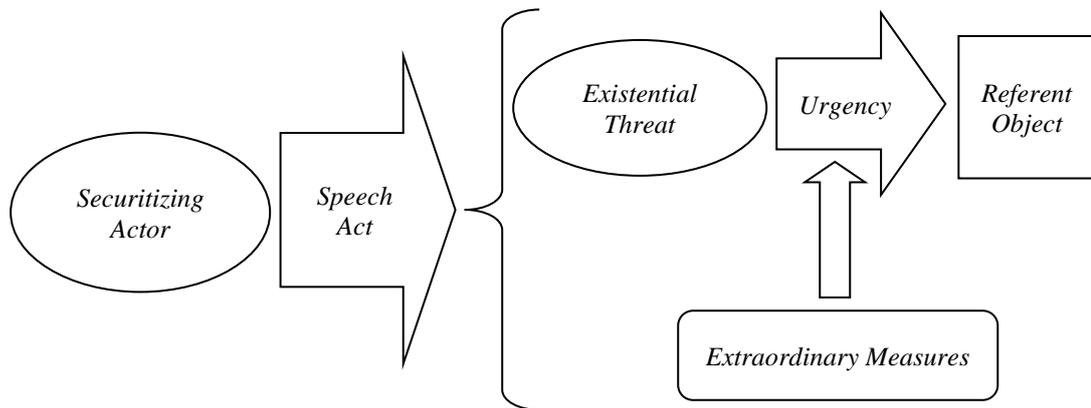
Merujuk pada teori sekuritisasi, proses sekuritisasi terejawantahkan melalui *speech act*, yang berarti proses melabelisasi sebuah fenomena atau permasalahan sebagai isu keamanan sehingga permasalahan tersebut menjadi Masalah keamanan. Proses sekuritisasi sebuah isu tidak didasarkan pada kondisi apakah memang terdapat sebuah ancaman, melainkan sebuah proses yang subjektif dimana isu tertentu dapat dikonstruksi secara sosial dan politik sebagai sebuah ancaman.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid

**Gambar 1.1 Model Sekuritisasi**



Sumber: Olahan Peneliti Merujuk Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998)

Menurut Buzan et al. (1998) bahwa proses sekuritisasi isu tertentu menghasilkan pandangan bahwa kondisi telah menjadi darurat sehingga melegitimasi untuk menerapkan tindakan-tindakan yang luar biasa untuk menghadapi permasalahan tersebut. dengan mendeklarasikan bahwa *referent object* berada dalam kondisi yang mengancam eksistensialnya, maka *securitizing actor* menyatakan bahwa tindakan luar biasa harus diambil untuk mengatasi ancaman tersebut demi keberlangsungan *referent object*. Proses sekuritisasi sebuah isu melalui *speech act* hanya dapat dilakukan oleh aktor-aktor politik, dimana para aktor politik tersebut memutuskan apa sebuah isu harus diperlakukan sebagai ancaman eksistensial, sementara para analis berusaha untuk mengamati dengan cermat tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan para aktor politik dan memilah

apakah tindakan dan kebijakan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan sekuritisasi terhadap sebuah isu.<sup>44</sup>

Upaya sekuritisasi dapat berhasil apabila telah tercapai syarat-syarat berikut: Pertama, harus adanya proses untuk memperlihatkan bahwa sebuah isu telah menjadi ancaman terhadap eksistensial *referent object* melalui *speech act*; *securitizing actor* memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut; para *audience* dari *speech act* keamanan menerima klaim dari *securitizing actor*; dan terdapat ancaman eksistensial yang memungkinkan terjadinya sekuritisasi.<sup>45</sup> Maka dari itu sebuah ancaman dianggap harus disekuritisasi ketika hanya ancaman tersebut telah diakui sebagai isu keamanan dalam lingkungan akademik dan wacana perumusan kebijakan yang lebih luas.

Dalam istilah yang lebih konkret, sebuah negara, dengan mengidentifikasi sebuah perkembangan isu keamanan tertentu, dapat mengklaim hak istimewa untuk menerapkan upaya yang maksimal dalam menghadapi isu tersebut. Merujuk pada Waeber (1998) yang menyatakan bahwa “*when a problem is securitized, it leads to specific ways of addressing it: Threat, defence, and often state-centred solutions*”.<sup>46</sup> Solusi atau cara menghadapi Masalah tersebut termasuk alokasi sumber daya, keterlibatan militer dan legislasi.

Kebijakan Hungaria terhadap para pengungsi asal Suriah merupakan refleksi dari upaya sekuritisasi, tetapi proses sekuritisasi yang dilakukan oleh

---

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid., h. 33

<sup>46</sup> Ibid., h. 65

Hungaria merupakan sekuritisasi sebuah isu yang tidak bertanggung jawab dan salah arah, karena hal tersebut malah memberikan pemegang kekuasaan begitu banyak celah dalam mengeksploitasi sebuah isu untuk kepentingan pribadi.<sup>47</sup> Merujuk pada Buzan et al. (1998) yang memberikan kita peringatan yang sama dimana tindakan mem-*framing* sebuah isu sebagai ancaman tanpa pertimbangan konsekuensinya akan mengarah pada eksploitasi kewenangan untuk melakukan sekuritisasi isu oleh *securitizing actor* demi mencapai kepentingan domestik, seperti membungkam suara dari pihak oposisi dan menjustifikasi kebijakan yang tidak demokratis.<sup>48</sup> Maka penting untuk menggaris bawahi bahwa tanggung jawab para aktor dan analis dalam proses sekuritisasi sebuah isu, dan tidak semua isu yang genting dapat disekuritisasi.

### **1.8.3 Konsep Ancaman Eksistensial dan Keamanan Komunitas**

Ancaman didefinisikan sebagai sebuah rangkaian fenomena yang menyebabkan sebuah negara dan masyarakatnya berada dalam kondisi ketakutan akan bahwa sistem (*values*) diserang, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Buzan (1991) bahwa “*security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*”.<sup>49</sup> Ancaman dapat dikategorikan menjadi lima tipe, yang dibagi atas aspek-aspek militer, sosial, politik, ekonomi dan ekologi.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Mely Caballero-Anthony, *On Security*. Op. Cit., h. 9

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Buzan, Op. Cit., h. 4

<sup>50</sup> Ibid., h. 116-134

Ancaman eksistensial didefinisikan sebagai ancaman bagi keberadaan sesuatu – ketika kelanjutan keberadaan sesuatu dipertaruhkan atau dalam bahaya. Ancaman eksistensial digunakan untuk mendeskripsikan ancaman terhadap makhluk hidup serta nilai-nilai intrinsik yang melekat, seperti negara atau ideologi.<sup>51</sup> Sebuah ancaman pada umumnya dianggap sebagai ancaman eksistensial jika berskala besar, seperti krisis pengungsi. Ancaman eksistensial bisa menjadi ancaman terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak hidup, seperti nilai-nilai, kepercayaan dan ideologi sebuah kelompok masyarakat atau negara.

Merujuk pada Richard Ullman (1983) bahwa dalam konteks ancaman perlu disadari bahwa keamanan dapat didefinisikan tidak hanya sebagai tujuan tetapi sebagai konsekuensi – ini berarti bahwa kita mungkin tidak menyadari apa itu atau betapa pentingnya hal itu sampai kita terancam kehilangannya. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, keamanan didefinisikan dan dinilai berdasarkan ancaman yang dihadapi.<sup>52</sup> Peneliti melihat bahwa kita tentu saja terbiasa memikirkan keamanan nasional dalam artian ancaman militer yang muncul dari luar batas negara sendiri. Tetapi, penekanan itu sangat menyesatkan. Hal tersebut seperti apa yang dijelaskan oleh Ullman (1983) bahwa penekanan ancaman berasal dari militer dan datang dari luar negara mengalihkan perhatian dari ancaman non-militer yang menjanjikan untuk merusak stabilitas banyak negara selama tahun-tahun mendatang.<sup>53</sup> Sehingga, pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa ancaman yang timbul dari

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Richard H. Ullman. 1983. Redefining Security, *International Security*, Vol. 8 No. 1., h.133.

<sup>53</sup> Ibid.

luar suatu negara menjadi lebih berbahaya bagi keamanannya daripada ancaman yang muncul di dalamnya.

Ullman (1983) mendefinisikan ancaman dalam istilah yang lebih praktikal (meskipun tentu saja tidak konvensional) yaitu, ancaman terhadap keamanan nasional adalah tindakan atau rangkaian peristiwa yang (1) mengancam secara drastis dan dalam rentang waktu yang relatif singkat untuk menurunkan kualitas hidup penduduk suatu negara, atau (2) mengancam secara signifikan untuk mempersempit jangkauan pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah suatu negara atau swasta, entitas non-pemerintah (individu, kelompok, perusahaan) di dalam negara.<sup>54</sup> Dalam kategori pertama peneliti melihat bahwa akan terdapat spektrum gangguan dan ancaman mulai dari perang eksternal hingga pemberontakan internal, dari blokade dan boikot hingga kekurangan bahan mentah dan bencana “alam” yang menghancurkan seperti epidemi yang membinasakan, banjir yang dahsyat, atau kekeringan yang masif dan meluas. Berdasarkan potensi ancaman diatas, dapat dilihat dengan cukup jelas bahwa di hadapan Hungaria, kedatangan para pengungsi asal Suriah yang disebabkan oleh perang eksternal ke dalam wilayah Hungaria telah disadari mengancam kemaslahatan dan keamanan komunitas masyarakat Hungaria secara drastis.

Dalam kategori kedua, Ullman (1983) mencontohkannya dengan cara merefleksikan bagaimana ancaman dipandang dari Nazi Jerman ke Amerika Serikat yang dibahas pada tahun-tahun sebelum masuknya Amerika ke dalam Perang Dunia II – atau, bagaimana cara memandang ancaman dari Uni Soviet di sebagian besar

---

<sup>54</sup> Ibid.

era pasca perang. Kematian dan kehancuran fisik, tentu saja, merupakan salah satu realisasi dari ancaman tersebut. Mereka merepresentasikan “penurunan kualitas hidup” dalam bentuknya yang paling ekstrim, dan mereka akan menjadi akibat perang yang tak terhindarkan.<sup>55</sup>

Pengungsi asal Suriah dipandang oleh Hungaria merupakan sebuah ancaman eksistensial terhadap budaya Kristiani, keamanan nasional dan stabilitas perekonomian, serta kedaulatan Hungaria sebagai negara di Uni Eropa. Sehingga hal tersebut memberikan justifikasi untuk menerapkan *extraordinary measures* untuk menghadapi ancaman tersebut. Merujuk pada Buzan (1998) bahwa kedaulatan sebuah negara dapat berada dalam ancaman yang disebabkan oleh kelumpuhan pertahanan atau kerusakan infrastruktur, ancaman tersebut dapat berasal dari luar atau dari dalam negara.<sup>56</sup> Tapi anggaphlah perang belum datang. Misalkan Jerman Hitler atau Rusia Stalin telah menegaskan dominasi atas Eropa Barat dan, mungkin, bagian lain dunia juga. Hitler dan Stalin akan mengorganisir masyarakat-masyarakat itu dengan cara yang hampir pasti secara substansial akan menutup mereka dari Amerika Serikat. Hal tersebut, tentu saja, berarti lebih sedikit peluang bagi pedagang dan investor Amerika. Tetapi juga akan ada lebih sedikit peluang untuk pertukaran intelektual, budaya, dan ilmiah yang tidak terkekang.

Kemudian, hilangnya kebebasan sipil dan politik di negara-negara yang sama-sama menganut pada nilai-nilai yang Amerika Serikat anut akan membuat lebih sulit untuk memastikan pelestariannya oleh Amerika Serikat yang terisolasi

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Barry Buzan, *People, State and Fear: The National Security Problem in International Relations* (London: Wheatsheaf Books, 1983) h. 57

dan bahkan terkepung. Dalam jangkauan cara yang luas, rentang opsi yang terbuka bagi pemerintah Amerika Serikat, dan untuk individu serta kelompok dalam masyarakat Amerika, akan sangat berkurang.<sup>57</sup> Berangkat dari refleksi tersebut, peneliti melihat bahwa dalam konteks Hungaria, “penurunan kualitas hidup” yang dimaksud adalah komunitas masyarakat Hungaria yang diancam oleh perebutan dengan kelompok lain, yaitu pengungsi asal Suriah. Hal tersebut, dapat menyebabkan penyempitan opsi pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk melindungi kepentingannya yaitu keamanan komunitas lokalnya, sehingga dalam hal ini pengungsi asal Suriah harus dikorbankan dan dipersepsikan sebagai ancaman sehingga satu kepentingan dapat terselamatkan yaitu keamanan dan kesejahteraan masyarakat Hungaria.

Ancaman merupakan sebuah masalah yang mengganggu sebuah sistem, dalam konteks penelitian ini ancaman yang dimaksud adalah pengungsi yang telah melalui proses sekuritisasi oleh pemerintah Hungaria. Konsepsi ancaman dalam penelitian ini adalah proses subjektif dimana isu tertentu terkonstruksi secara sosial dan politik, dan bukanlah ancaman yang secara alamiah mengancam.<sup>58</sup> Proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Hungaria terhadap isu pengungsi tidak berlandaskan adanya urgensi yang mengancam keamanan Hungaria, tetapi isu pengungsi secara subjektif dikonstruksi dalam interaksi sosial dan politik untuk menjadi sebuah ancaman. Dengan memahami dan mengkontekstualisasikan isu

---

<sup>57</sup> Richard H. Ullman. Op. Cit.

<sup>58</sup> Buzan et al., Op. Cit., h. 32

pengungsi dan konsep ancaman maka dapat membantu peneliti dalam memetakan jawaban dari perumusan masalah.

Merujuk Caballero-Anthony (2016) menjelaskan bahwa komunitas internasional telah mengidentifikasi bahwa keamanan komunitas (*community security*) merupakan aspek penting dari keamanan manusia (*human security*). Keamanan komunitas didefinisikan sebagai perlindungan terhadap kehancuran komunitas akibat dari hilangnya nilai-nilai dan budaya tradisional.<sup>59</sup> Kemudian, dijelaskan juga bahwa narasi dari keamanan komunitas telah berkembang dengan penambahan kombinasi keamanan kelompok dan keamanan individu, dimana ditekankan bahwa ancaman terhadap individu dapat berasal dari kelompok-kelompok komunitas lain (ketegangan etnis).<sup>60</sup> Merujuk dari definisi tersebut, peneliti mengidentifikasi bahwa yang dimaksud oleh Hungaria terkait isu krisis pengungsi asal Suriah sebagai ancaman adalah ancaman pengungsi sebagai kelompok Islam terhadap masyarakat Hungaria sebagai kelompok Kristiani.

#### **1.8.4 Konsep Keamanan Non-Tradisional**

Dalam perkembangannya studi keamanan berfokus terhadap pada isu militer atau strategis yang memiliki kecenderungan untuk dipengaruhi oleh dominasi aliran realisme. Studi keamanan merujuk pada Barry Buzan (1987) menyatakan bahwa dalam perkembangannya studi keamanan merupakan cabang dari politik dan tetap memasukan nilai-nilai realisme di dalamnya.<sup>61</sup> Meskipun

---

<sup>59</sup> Mely Caballero-Anthony et al., *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach* (London: SAGE Publications Ltd, 2016) h. 61-62

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 62

<sup>61</sup> Barry Buzan, *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*, (London: Palgrave Macmillan, 1987)

terdapat perspektif baru dalam studi keamanan, bukan berarti studi keamanan tidak membahas mengenai isu militer atau hal teknis militer seperti alutsista. Studi keamanan masih tetap membahas hal tersebut, tetapi terdapat penambahan terkait fokus isu seperti politik.

Terdapat perdebatan mengenai apakah studi keamanan harus memperluas cakupan kajiannya atau tetap berfokus dalam isu yang bersifat *high politics*. Para ahli dari keamanan tradisional berargumen bahwa apabila cakupan kajian studi keamanan diperluas maka akan terjadi kondisi dimana studi keamanan kehilangan fokus dan arah.<sup>62</sup> Lebih jauh Kenneth Waltz (1979) berpendapat bahwa perluasan cakupan dengan memasukan isu keamanan non-tradisional dalam studi keamanan dapat menyebabkan hilangnya koherensi bidang keilmuan atau “*undermines the field’s intellectual coherence*”.<sup>63</sup>

Perkembangan terkait gagasan mengenai isu keamanan non-tradisional mulai mencuat sejak awal tahun 1980-an yang mengusung bahwa ancaman yang diberikan dari militer bukan lagi ancaman yang bersifat mengancam secara langsung, melainkan isu-isu keamanan non-tradisional seperti kemiskinan, ekonomi, kelaparan, migrasi dan pengungsi adalah isu yang dapat mengancam eksistensi individu secara langsung. Para ahli yang mengusung isu keamanan non-tradisional diantaranya adalah Barry Buzan yang telah mengkategorikan cakupan

---

<sup>62</sup> Ken Booth, *Critical Explorations, Critical Security Studies and World Politics*, ed. Ken Booth (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2005)

<sup>63</sup> Richard W. Jones, *Security, Strategy, and Critical Theory*, (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1999)

isu keamanan dalam lima sektor, yaitu: militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan, dimana setiap sektornya mengidentifikasi dari interaksi yang ada.<sup>64</sup>

Menurut Buzan, kepentingan negara adalah faktor yang menentukan karakter dari sebuah agenda yang terdapat diatas<sup>65</sup>. Kajian keamanan non-tradisional dipelopori oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde yang lebih dikenal sebagai kelompok *Copenhagen School*. Pemikir dari kelompok ini beranggapan bahwa keamanan tidak selalu berhubungan dengan keamanan tradisional atau kekuatan militer di suatu negara saja, tetapi studi keamanan telah mengalami perkembangan menjadi studi keamanan yang membahas mengenai keamanan non-tradisional. Salah satu kontribusi dan hasil pemikiran dari *Copenhagen School* adalah keamanan masyarakat dan sekuritisasi.<sup>66</sup>

Merujuk pada penjelasan Buzan terkait lima sektor dalam keamanan non-tradisional, dalam penelitian ini sektor yang peneliti identifikasi sebagai sektor yang mencakup analisis fenomena pemerintah Hungaria yang mensekuritisasi isu pengungsi asal Suriah sebagai sebuah ancaman adalah sektor keamanan khususnya terhadap keamanan nasional. Merujuk pada Buzan (1998) kajian keamanan dapat dikaitkan dengan keamanan nasional yang diasosiasikan dengan keamanan sosial, dimana secara definisi keamanan sosial adalah keberlangsungan dalam suatu

---

<sup>64</sup> Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998) h. 7-8.

<sup>65</sup> Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, (London: Harvester Wheatsheaf, 1991) h. 9-20.

<sup>66</sup> Mely Caballero-Anthony, *On Security, An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach*, ed. Mely Caballero-Anthony (London: SAGE Publications Ltd, 2016) h. 8-11.

kondisi yang memenuhi syarat-syarat terjadinya perubahan (evolusi) dari pola-pola tradisional terkait bahasa, budaya, dan agama serta identitas nasional dan adat.<sup>67</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi bahwa fenomena krisis pengungsi yang terjadi di kawasan Eropa, khususnya Hungaria merupakan fenomena yang menjadi dasar dari sekuritisasi pemerintah Hungaria dalam upaya untuk mengkonstruksi kondisi nilai-nilai budaya dan identitas nasional masyarakat Hungaria dalam menyikapi isu krisis pengungsi sebagai sebuah fenomena yang mengancam eksistensi dan keberlangsungan nilai-nilai yang dianut masyarakat Hungaria sehingga hal tersebut mendorong dan sekaligus menjustifikasi sikap pemerintah Hungaria untuk mengambil kebijakan yang drastis terhadap pengungsi asal Suriah.

Peneliti melihat bahwa dalam keamanan sosial, suatu aktor dalam hal ini adalah pemerintah Hungaria menggunakan justifikasi untuk mengamankan identitas nasional Hungaria dalam upaya untuk melakukan sekuritisasi terhadap pengungsi asal Suriah. Merujuk pada Waeber (1995) menjelaskan bahwa ketidakamanan sosial bermuara ketika sebuah kelompok dominan dalam sebuah masyarakat merasa terancam, merasa bahwa nilai-nilai identitas kelompok tersebut terancam oleh imigrasi, integrasi, atau imperialisme budaya, kelompok tersebut akan melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankannya.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Buzan et al., *Op. Cit.*, h. 19.

<sup>68</sup> Mely Caballero-Anthony, *Conflict and Community Security, An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach*, ed. Mely Caballero-Anthony (London: SAGE Publications Ltd, 2016) h. 4-5.

Isu krisis pengungsi dalam penelitian ini adalah katalis yang mendorong pemerintah Hungaria untuk melakukan sekuritisasi terhadap isu pengungsi di Hungaria, dengan cara menunjukkan pada masyarakat Hungaria bahwa keberadaan pengungsi asal Suriah merupakan sebuah ancaman terhadap nilai-nilai dan budaya masyarakat Hungaria sehingga pemerintah Hungaria sebagai penyambung tangan masyarakat Hungaria memberikan sikap dan kebijakan-kebijakan yang berlawanan dengan prinsip perjanjian Dublin dan Konvensi 1951.

Keamanan komunitas membahas mengenai *freedom from fear* dan *freedom want*, dalam penelitian ini kelompok tersebut adalah masyarakat Hungaria, dimana peneliti melihat bahwa pemerintah Hungaria berusaha untuk membangun wacana bahwa dengan adanya isu krisis pengungsi maka masyarakat Hungaria berada dalam kondisi yang terancam. Merujuk pada penjelasan Mely Caballero-Anthony (2018) menjelaskan bahwa keamanan komunitas ditekankan pada kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok minoritas atau kelompok yang termarginalisasi, penelitian ini menjadi menarik karena kelompok yang dipersepsikan berada dalam ancaman adalah masyarakat Hungaria secara umum dimana masyarakat Hungaria tidak berada dalam kategori kelompok yang termarginalkan atau kelompok minoritas, tetapi pemerintah Hungaria berusaha untuk mengkonstruksi bahwa masyarakat Hungaria yang menjadi terancam dengan adanya isu krisi pengungsi.

Sesuai dengan penelitian yang diteliti, konsep keamanan non-tradisional berkontribusi dalam membantu peneliti untuk menjawab perumusan Masalah mengenai transisi keamanan tradisional menjadi keamanan non-tradisional dalam

konteks ancaman yang menjadi perhatian negara, dimana dalam penelitian ini keamanan non-tradisional yang dimaksud adalah fenomena yang terjadi di Hungaria, terkait kebijakan terhadap pengungsi asal Suriah untuk masuk ke dalam wilayahnya, akibat terdapat transisi persepsi keamanan tradisional menjadi keamanan non-tradisional dimana isu pengungsi telah dikonstruksi sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan nasional Hungaria. Berangkat dari transisi ancaman tersebut, Hungaria mengeluarkan kebijakan larangan masuk terhadap pengungsi asal Suriah ke dalam wilayahnya, kebijakan tersebut dapat disebabkan oleh aktor-aktor di dalam pemerintahan Hungaria mengkonstruksi ide yang berasal dari interaksi sosial yang terjadi menghasilkan persepsi bahwa pengungsi asal Suriah telah menjadi ancaman terhadap keamanan nasionalnya.

### **1.8.5 Konsep Pengungsi**

Pengungsi yang dimaksud dalam penelitian ini dijadikan sebuah subjek ancaman bagi Hungaria yang dikonstruksi melalui proses sekuritisasi. Pengungsi sendiri dalam pengertiannya merupakan sekelompok orang yang terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya karena adanya bahaya terhadap diri mereka. Bahaya yang menyebabkan terjadinya fenomena pengungsi dapat berupa bencana alam, penindasan, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, sampai dengan konflik bersenjata, dalam menghindari hal tersebut dilakukan dengan cara berpindah tempat di dalam satu wilayah negara atau ke negara lain.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Achmad Romsan et al., *Pengantar Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional* (Bandung: Sabc Offset, 2003)

Merujuk pada penjelasan Paul Weis dalam tulisannya yang berjudul *The Development of Refugee Law*, pengungsi adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena penganiayaan, perang atau kekerasan. Seorang pengungsi memiliki rasa takut yang beralasan akan penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, opini politik, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu.<sup>70</sup> Kemungkinan besar, mereka tidak dapat kembali ke rumah atau takut untuk melakukannya. Perang dan kekerasan etnis, suku dan agama adalah penyebab utama pengungsi meninggalkan negara mereka. Kaitannya dengan isu krisis pengungsi yang terjadi di Eropa adalah, sebagian besar pengungsi asal Suriah yang telah masuk ke wilayah Eropa tidak memiliki pilihan selain mengharapkan perlindungan.

Dalam kasus Hungaria, kebijakan untuk mensekritisasi pengungsi diambil karena pemerintah Hungaria melihat adanya kecenderungan masyarakatnya yang tidak memperdulikan bagaimana dan mengapa para pengungsi harus masuk ke Hungaria, sehingga proses labelisasi akan lebih mudah diterima. Maksud peneliti yang menyebutkan ketidakpedulian masyarakat Hungaria terkait pengungsi adalah hukum internasional yang mengikat Hungaria dengan pengungsi yang didasarkan pada Konvensi 1951. Merujuk pada isi Konvensi 1951 yang menyebutkan bahwa tanggung jawab dalam melindungi dan menerima para pengungsi dibebankan kepada pihak-pihak yang meratifikasi Konvensi 1951,<sup>71</sup> termasuk Hungaria.

---

<sup>70</sup> Konvensi terkait Status Pengungsi dalam Konvensi 1951, ed. Paul Weis, 1982, *The Development of Refugee Law*, *Michigan Journal of International Law*, Vol. 3, No. 1, h. 27

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 28-29

Fenomena pengungsi dan migrasi tidak dapat dilepaskan dari adanya *Push and Pull Factors*, merujuk pada Lee (1966) terkait *push-pull framework*, terdapat empat faktor yang mempengaruhi arus migrasi dan pengungsi: 1) faktor yang diasosiasikan dengan negara asal, 2) faktor yang diasosiasikan dengan negara tujuan, 3) intervensi rintangan, 4) faktor personal.<sup>72</sup> Baik negara asal dan tujuan, terdapat faktor-faktor yang dapat mencegah, menahan dan menarik individu (*pull factors*) atau faktor-faktor yang mendorong individu untuk pergi (*push factors*). Keputusan untuk melakukan perjalanan juga dipengaruhi oleh faktor intervensi rintangan yang ada negara transit.

Merujuk pada Lee (1966) menjelaskan secara komprehensif bagaimana dari empat faktor diatas terkait *pull-push factors* bermuara dalam faktor sosio-ekonomi, politik, demografi, dan kesamaan sejarah, budaya, dan geografi di negara asal dan tujuan, serta kebijakan imigrasi yang berlaku di negara tujuan.<sup>73</sup> Dalam segi sosio-ekonomi, faktor ekspektasi dan kenyataan dari perbedaan upah kerja, kemudian perbedaan standar hidup, ketersediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi atau tingkat kesempatan bekerja antara negara asal dan tujuan menjadi faktor yang signifikan dalam mendorong atau mencegah mobilitas, faktor politik di negara asal dan negara tujuan juga memainkan peran signifikan dalam mendorong dan mencegah mobilisasi pengungsi, tingkat konflik, kekerasan, ancaman terhadap keamanan individu, stabilitas politik, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi

---

<sup>72</sup> Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration. *Demography*, 3(1), h. 47-57, ed. European Asylum Support Office, *The Push and Pull Factors of Asylum Migration – Related Migration A Literature Review*, (Belgia: EASO, 2016) h. 10

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 24-30.

determinan utama dalam pergerakan migrasi dan pengungsi, faktor demografi seperti pertumbuhan populasi, tingkat angka hidup dan kelahiran, dan kepadatan penduduk turut menjadi *pull-push factors* dalam mobilisasi pengungsi, kemudian mobilisasi migrasi dan pengungsi juga ditentukan oleh faktor kesamaan sejarah, budaya, dan geografi di negara tujuan agar adaptasi yang harus dilakukan tidak terlalu sulit, seperti kesamaan ikatan sejarah kolonial, kesamaan budaya terkait bahasa, dan jauh atau dekat jarak negara tujuan, terakhir adalah faktor kebijakan imigrasi di negara tujuan menjadi ukuran penting bagi mobilisasi pengungsi dan migran karena pengungsi dan migran tentunya akan lebih mengutamakan negara-negara yang memiliki kebijakan terbuka dengan migran dan pengungsi, seperti apa yang terjadi di Eropa.<sup>74</sup>

Dalam mobilisasi pengungsi, tentunya negara tujuan menjadi pertimbangan utama, tetapi dalam praktiknya untuk mencapai negara tujuan para pengungsi harus memasuki negara transit karena selain hambatan geografis yaitu perbatasan dan regulasi, para pengungsi juga tidak membawa persediaan pangan dan obat-obatan yang memadai sehingga harus melakukan transit terlebih dahulu. Merujuk pada *International Organization for Migration (IOM)* mendefinisikan terkait *Country of Destination/Host Country* sebagai negara yang menjadi tujuan dari arus migrasi (migran atau pengungsi), sementara *Country of Transit* sebagai negara yang dilalui oleh arus migrasi (migran atau pengungsi).<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> William A. Lewis (1954). Economic development with unlimited supplies of labor. *The Manchester School of Economic and Social Studies*, 22, 139-191.

<sup>75</sup> Richard Perruchoud dan Jillyanne Redpath-Cross, Glossary on Migration, *International Migration Law*, 2(25), h. 22

Berdasarkan penjelasan kerangka teoritis diatas, dalam penelitian ini pendekatan konstruktivisme merupakan *tool of analysis* bagi peneliti dalam memahami fenomena sekuritisasi isu krisis pengungsi oleh Hungaria. Dalam mempertajam analisis fenomena, maka peneliti menggunakan teori sekuritisasi sebagai panduan dalam melihat bagaimana isu pengungsi dikonstruksi sebagai sebuah ancaman melalui proses yang subjektif secara sosial dan politik dengan melihat proses *speech act* dan kebijakan Hungaria terhadap pengungsi asal Suriah, dan dengan teori sekuritisasi peneliti dapat menganalisis bagaimana sebuah isu dapat dikategorikan menjadi sebuah ancaman sehingga dapat terkonstruksi mengapa Hungaria melakukan hal tersebut yang dipaparkan dalam bab empat. Konsep keamanan non-tradisional dalam penelitian ini berperan dalam memberikan peneliti gambaran terkait bagaimana proses transisi sebuah isu pengungsi (non-militer) dapat menjadi sebuah kajian keamanan dan menjadi pertimbangan keamanan Hungaria dalam konteks isu krisis pengungsi di Hungaria dengan melihat kebijakan dan *speech act* yang dilakukan Hungaria terhadap pengungsi asal Suriah yang dipaparkan dalam bab tiga. Konsep pengungsi digunakan dalam penelitian ini karena dapat membantu peneliti dalam menganalisis bagaimana krisis pengungsi dapat terjadi, dengan melihat bagaimana dinamika *push-pull factors* yang menjadi determinan mobilisasi pengungsi ke Eropa, dibantu dengan melihat dari prospek yang ada di *destination country* dan tantangan di *transit country* yang dipaparkan dalam bab dua.

### 1.8.6 Konsep Politik Identitas

Peneliti menggunakan konsep politik identitas dengan tujuan untuk memahami bagaimana Hungaria melakukan sekuritisasi terhadap isu krisis pengungsi. Dalam penelitian ini, sekuritisasi yang dilakukan oleh Hungaria terhadap isu krisis pengungsi ditekankan pada upaya bagaimana Hungaria meyakinkan masyarakatnya sebagai *referent object* bahwa isu krisis pengungsi merupakan sebuah ancaman eksistensial yang memerlukan *extraordinary measures* dalam penanganannya. Peneliti melihat bahwa dalam upaya meyakinkan masyarakatnya bahwa isu krisis pengungsi merupakan sebuah ancaman eksistensial dengan menggunakan politik identitas sebagai instrumen dalam mempengaruhi pandangan masyarakat Hungaria terhadap isu krisis pengungsi.

Dalam memahami retorika anti-pengungsi yang digunakan oleh *securitizing actors* di Hungaria, peneliti mengidentifikasi bahwa penting untuk terlebih dahulu melihat bagaimana konsep identitas dikonstruksi menjadi instrumen diskursus politik. Peneliti melihat bahwa faktor identitas menjadi penting karena retorika dari para *securitizing actors* di Hungaria dibangun atas dasar segregasi identitas. Merujuk Geertz (1973) yang menjelaskan bahwa identitas lekat dengan pandangan primordialisme, dimana identitas merupakan sesuatu yang terberi dan alamiah.<sup>76</sup> Berangkat dari penjelasan tersebut, peneliti melihat bahwa dalam konteks sekuritisasi yang dilakukan oleh Hungaria terhadap isu krisis pengungsi, faktor

---

<sup>76</sup> Geertz, C. *The Interpretation of Cultures*. (New York City, NY: Basic Books, Inc., 1973) h. 259-260.

identitas memiliki posisi sentral dalam retorika anti-pengungsi *securitizing actors* di Hungaria.

Konstruksi politik identitas *securitizing actors* di Hungaria ditekankan pada dinamika konsep “Kami” dan “Liyani”, oleh *securitizing actors* di Hungaria kedua konsep tersebut digambarkan sebagai representasi dari interaksi konfliktual antara masyarakat Hungaria sebagai “Kami” dan pengungsi asal Suriah sebagai “Liyani” yang tidak dapat dihindarkan.<sup>77</sup> Hal tersebut didukung dengan pandangan Pradana (2018) yang menjelaskan bahwa pandangan primordialisme memahami konflik sebagai akibat dari satu kelompok beridentitas serupa yang melindungi dirinya dari kelompok lain yang berbeda identitas.<sup>78</sup> Berangkat dari penjelasan tersebut, peneliti melihat bahwa pandangan primordialisme yang digambarkan oleh konsep identitas “Kami” akan terancam dengan adanya identitas “Liyani”, sehingga akhirnya konflik tidak dapat dihindarkan. Peneliti mengidentifikasi bahwa fenomena di atas akhirnya membentuk kebijakan anti-pengungsi Hungaria, dimana pemerintah Hungaria berusaha untuk memindahkan isu identitas ke dalam diskursus politik.

Dalam konteks politik identitas, pemerintah Hungaria menggunakan metode labelisasi pengungsi sebagai sebuah identitas asing yang mengancam identitas Hungaria dan merebut hak-hak masyarakat Hungaria. Peneliti melihat bahwa Hungaria, sebagai salah satu negara penerima pertama, menolak kedatangan pengungsi akibat adanya berbagai kewajiban yang diatur melalui Perjanjian Dublin. Peraturan ini mewajibkan pengungsi untuk dicatatkan di negara Uni Eropa yang

---

<sup>77</sup> Pradana, Aldoreza. Op. Cit. h. 2-3.

<sup>78</sup> Ibid.

pertama disinggahi, yang kemudian dibebankan tanggung jawab untuk mengurus pengungsi tersebut.<sup>79</sup> Kewajiban ini memicu penggunaan politik identitas sebagai siasat pemerintah Hungaria guna menolak pengungsi dan “agenda Eropa Barat” dalam aturan Uni Eropa. Situasi ini memunculkan polemik tentang bagaimana seharusnya pengungsi ditangani. Dalam kasus pencari suaka dan pengungsi, politik identitas sering kali menjadi narasi pemerintah untuk memobilisasi rasa takut dan kecemasan pada “Liyen”.

Politik identitas digunakan pemerintah Hungaria dalam membentuk rasa takut masyarakat Hungaria terhadap pengungsi.<sup>80</sup> Pemerintah Hungaria menggunakan identitas sebagai instrumen dalam mendulang dukungan masyarakat dengan melabelisasi pengungsi asal Suriah yang datang ke wilayah Eropa dan Hungaria sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan nasionalnya dan mengancam nilai-nilai identitas lokal Hungaria. Peneliti merasa penting untuk menekankan bahwa tidak semua pengungsi dapat menjadi sebuah ancaman, karena dalam penelitian ini pengungsi yang dimaksud adalah mereka yang melarikan diri dari negara asalnya akibat konflik dan perang. Sementara, kenyataan dilapangan adalah pemerintah Hungaria memilih labelisasi “migran ekonomi” terhadap para pengungsi asal Suriah dengan tujuan untuk menyebarkan ketakutan pada masyarakat Hungaria, dimana ketersediaan lapangan kerja merupakan salah satu permasalahan utama di Hungaria. Merujuk Papademetriou (2012) yang

---

<sup>79</sup> Pradana, Aldoreza. Op. Cit., h. 1-2.

<sup>80</sup> Prandana, A. (2016). ‘We do not want any refugees!’: The perception of identity on migration crisis and the migration crisis implications on Hungary. *University of Gothenburg Student Theses Directory*. Diakses dari: <http://hdl.handle.net/2077/52248>. h. 38.

menjelaskan terkait hubungan pengungsi dan ekonomi, bahwa para pengungsi seringkali dipandang oleh negara penerima sebagai sebuah beban finansial, dimana pengungsi menyumbang angka pengangguran, penyebab depresiasi upah, dan menyulitkan program kesejahteraan negara.<sup>81</sup>

Berjalan beriringan dengan faktor ekonomi, dalam konteks politik identitas yang digunakan pemerintah Hungaria terhadap pengungsi asal Suriah, perubahan budaya dan nilai juga menjadi kegelisahan utama masyarakat Hungaria. Peneliti melihat bahwa dengan menerima pengungsi, mereka takut masa depan Eropa berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Merujuk Prandana (2016) menjelaskan bahwa sebagai penganut Kristen yang kuat, masyarakat Hungaria khawatir akan ide Islamisasi di Eropa. Ketakutan pada perubahan budaya dan nilai juga sesuai dengan kenyataan bahwa masyarakat Hungaria, terutama mereka yang hidup di pedesaan, minim pengalaman hidup berdampingan dan berinteraksi masyarakat yang heterogen.<sup>82</sup>

Disisi lain, isu keamanan menjadi perhatian utama masyarakat Eropa bersamaan dengan munculnya arus pengungsi. Ancaman terorisme telah menjadi sebuah permasalahan yang dapat menyebarkan rasa teror dan kekhawatiran dari masyarakat Hungaria. Merujuk Pradana (2018) pemerintah Hungaria menggunakan politik identitas dengan mengkaitkan intensitas serangan terorisme akibat isu krisis pengungsi. Dalam beberapa kasus, seperti serangan teror bom di Bandara Brussels

---

<sup>81</sup> Papademetriou, D., G. (2012). Rethinking National Identity in the Age of Migration. *Migration Policy Institute*. Diakses dari: <http://www.migrationpolicy.org/research/TCM-rethinking-national-identity-council-statement>

<sup>82</sup> Prandana, A. Op. Cit. h. 42.

dan penembakan Charlie Hebdo, teroris memang memanfaatkan arus pengungsi untuk memobilisasi anggotanya melewati perbatasan Eropa. Namun, menggeneralisasi pengungsi sebagai teroris adalah sikap yang abai pada penderitaan mereka dan fakta bahwa mereka menuju Eropa untuk lari dari teroris.<sup>83</sup>

Peneliti mengidentifikasi bahwa pemerintah Hungaria bertujuan untuk mengakumulasi rasa takut dan cemas dari masyarakat Hungaria terhadap ‘Liyan’. Penggunaan politik identitas guna menyebarluaskan kepentingan sangat kentara dilakukan oleh pemerintah Hungaria dalam berbagai aspek, mulai dari aspek budaya, politik, keamanan, hingga ekonomi. Di Eropa, Gelombang Pengungsi 2015 turut memicu tumbuhnya populisme. Konsistensinya dalam menolak penerimaan pengungsi telah menampilkan Hungaria sebagai salah satu aktor berpengaruh bagi suara sayap-kanan di kawasan.

### **1.8.7 Konsep Kepentingan Nasional**

Konstruktivisme merupakan sebuah pandangan dalam analisis hubungan internasional yang menekankan pada preposisi bahwa kondisi yang telah menjadi norma dan kebiasaan bukanlah ada dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil dari keinginan aktor-aktor sendiri yang terkonstruksi melalui interaksi sosial.<sup>84</sup> Dalam penelitian ini pandangan konstruktivisme memberikan sudut pandangan terhadap peneliti bahwa pengambilan keputusan sebuah negara tidak serta-merta terjadi akibat dari kebiasaan dan sejarah yang mendorong sebuah negara untuk melakukan

---

<sup>83</sup> Prandana, A. Op. Cit. h. 4.

<sup>84</sup> Alexander Wendt. Op. Cit. h. 391–425.

hal yang sama, melainkan sebuah keputusan atau kebijakan didasari akibat dari keinginan negara itu sendiri yang didorong oleh norma, nilai dan identitas yang melekat dalam sebuah negara.

Dalam konteks kebijakan Hungaria menolak masuknya pengungsi asal Suriah, peneliti mengidentifikasi bahwa Hungaria melakukan sekuritisasi isu krisis pengungsi dalam upaya untuk meyakinkan masyarakat Hungaria bahwa pengungsi merupakan sebuah ancaman eksistensial terhadap keamanan Hungaria. Dalam konteks penelitian ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Hungaria dalam menghadapi permasalahan pengungsi yang berasal dari Suriah tidak dapat dilepaskan dari rasionalitas para pengambil kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan untung rugi.

Kepentingan nasional sebagai dasar perilaku negara sejalan dengan pernyataan Machiavelli yang dikutip dari Seabury (1963) bahwa kepentingan nasional akan senantiasa menjadi justifikasi serta dasar pertimbangan negara dalam berperilaku serta pengabaian terhadap moralitas oleh para pengambil kebijakan dalam urusan-urusan kenegaraan.<sup>85</sup> Moralitas sebuah negara yang tercermin dalam kepatuhan terhadap hukum maupun perjanjian yang diikuti, khususnya dalam penelitian ini mengenai pengungsi telah jauh dikesampingkan. Dalam penelitian ini, Hungaria menghadapi permasalahan pengungsi mengedepankan *power* melalui instrumen pemaksa yang diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan represif terhadap pengungsi. Kedaulatan dalam hal ini keamanan nasional merupakan harga

---

<sup>85</sup> Seabury, Paul. 1963. *Power, Freedom and Diplomacy: The Foreign Policy of the United States of America*. Random House: New York., h. 86.

mati sehingga aset-aset *power* yang dimiliki digunakan oleh Hungaria untuk menjamin keamanan nasionalnya dari ancaman pengungsi.<sup>86</sup>

Dalam penelitian ini, kepentingan nasional yang menjadi tujuan untuk dicapai dan dipertahankan oleh Hungaria yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan terhadap pengungsi dari Suriah akan dirujuk dari K.J Holsti. Holsti (1983) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kepentingan nasional dari sebuah negara yakni terkait dengan *core value*, *middle range objective* dan *long range objective*.<sup>87</sup> Dalam penelitian ini, analisis kepentingan keamanan nasional Hungaria didasarkan pada *core value*, dimana *core value* akan terkait dengan upaya dari sebuah negara untuk menjamin eksistensinya sehingga menjadi sesuatu yang tidak dapat dikompromikan terkait dengan keamanan nasional dan pembangunan ekonomi. Sementara *middle range objective* merupakan upaya dari sebuah negara untuk memperkuat posisinya dalam politik internasional yang terkait dengan kerjasama internasional, citra negara dan akomodasi kepentingan domestik. Terakhir adalah terkait dengan *long range objective* merupakan upaya pencapaian nilai-nilai ideal serta cita-cita dari sebuah negara baik dalam politik internasional maupun pada ranah domestik. Peneliti menekankan analisis kepentingan nasional Hungaria adalah sebagai katalis yang mendorong Hungaria untuk melakukan sekuritisasi terhadap isu krisis pengungsi asal Suriah yang dipandang oleh Hungaria kedatangan para pengungsi ini akan mengancam kedaulatannya.

---

<sup>86</sup> Burchill, Scott. 2005. *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave Macmillan: New York., h. 69.

<sup>87</sup> Holsti, K.J, 1983. *International Politics: Framework for Analysis*, Prentice-Hall: New Jersey. h. 129-134.

## 1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sebagian individu atau kelompok dianggap berasal dari Masalah sosial. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk menemukan pemahaman baru terkait mengapa Hungaria melakukan sekuritisasi terhadap pengungsi asal Suriah dengan cara melakukan *speech act* dalam upaya mendeklarasikan isu pengungsi yang terjadi di Hungaria sebagai sebuah ancaman terhadap *referent object* yaitu masyarakat Hungaria. Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai metode dalam penelitian ini karena metode kualitatif dapat membantu peneliti dalam mengeksplorasi dan menemukan pemahaman baru dari fenomena yang peneliti teliti, dimana fenomena yang diteliti merupakan fenomena sosial, sehingga antara fenomena yang diteliti dan metode penelitian yang digunakan memiliki keselarasan seperti apa yang sudah dijelaskan diatas.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema atau topik yang spesifik ke tema atau topik yang umum, dan menafsirkan makna dari sebuah data.<sup>88</sup> Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif maka hal ini dapat mempertajam hasil penelitian yang diambil dari berbagai upaya pengamatan

---

<sup>88</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Terjemahan Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 5

terhadap fenomena-fenomena interaksi yang terjadi diantara pemerintah Hungaria dan pengungsi asal Suriah dalam kontekstualisasi proses sekuritisasi.

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana tipe ini akan dapat menemukan sebuah fenomena kunci dari topik penelitian, tipe penelitian deskriptif mencakup suatu lingkungan penelitian dalam rentang waktu periode tertentu. Dengan mendeskripsikan topik penelitian secara komprehensif, maka hasil generalisasi dari gejala-gejala penelitian yang ada akan didapatkan dengan tajam.<sup>89</sup> Tipe penelitian deskriptif digunakan untuk mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis, proses sekuritisasi terhadap isu pengungsi asal Suriah yang dilakukan oleh Hungaria ketika terjadinya krisis isu pengungsi di Eropa.

### **1.9.2 Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam metode penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui proses dokumentasi, observasi perilaku atau wawancara dengan para partisipan. Peneliti tentu dapat menggunakan protokol sejenis instrumen untuk mengumpulkan data, tetapi peneliti tetap menjadi instrumen kunci dan peneliti juga yang sebenarnya menjadi satu-satunya instrumen dalam mengumpulkan informasi. Peneliti pada umumnya, tidak menggunakan kuesioner atau instrumen yang dibuat oleh peneliti lain.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 5

<sup>90</sup> John W. Creswell, *Op. Cit.*, 261

### 1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data meliputi upaya membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik itu bersifat terstruktur maupun tidak, dokumentasi, bahan-bahan materi visual, dan upaya merancang prosedur untuk merekam atau mencatat informasi.<sup>91</sup> Pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kualitatif, peneliti melakukan wawancara tatap muka (*face-to-face interview*) dengan partisipan. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.<sup>92</sup> Pengumpulan data sekunder yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis fenomena ini adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini dapat berupa dokumen publik seperti koran, makalah, laporan kantor atau dokumen privat, seperti buku harian, surat dan email.<sup>93</sup>

### 1.9.4 Teknik Analisis Data

Analisis terhadap fenomena krisis pengungsi yang membuat Hungaria melakukan sekuritisasi dengan menjadikan pengungsi asal Suriah sebagai ancaman keamanan nasional, dilakukan dengan cara wawancara dan studi literatur, kemudian mengorganisasikan data-data mana saja yang termasuk ke dalam proses sekuritisasi

---

<sup>91</sup> Ibid., 266

<sup>92</sup> Ibid., 267

<sup>93</sup> Ibid., 267-270

Hungaria terhadap pengungsi asal Suriah, dan terakhir adalah membuat kesimpulan dari penelitian yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data secara induktif menurut Miles dan Huberman (1994), yaitu melalui.<sup>94</sup>

#### **1.9.4.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Laporan-laporan tersebut perlu direduksi, dirangkum, dipertajam pada hal-hal yang penting, maka laporan lapangan dapat dikatakan sebagai bahan menta yang mengalami proses reduksi, dipersingkat, disusun dengan lebih sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk dikendalikan. Reduksi data diperlukan terlebih lagi untuk memproses data-data primer. Hal tersebut dikarenakan selama proses wawancara, terkadang terdapat perluasan pembahasan untuk menyokong jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

#### **1.9.4.2 Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data adalah analisis data dalam bentuk laporan lapangan yang sulit untuk ditangani. Dengan sendirinya peneliti akan sulit melihat gambaran keseluruhannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Maka dengan penyajian data substansi data yang diperlukan dapat diperoleh guna menunjang analisis yang diperlukan.

---

<sup>94</sup> Matthew B. Miles dan Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publications Ltd, 1994.

### 1.9.4.3 Kesimpulan dan Verifikasi

Mengambil kesimpulan dan verifikasi adalah proses yang dilakukan oleh peneliti sejak awal peneliti dalam mencari makna dari data yang telah dikumpulkan. Untuk itu peneliti mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Dapat dikatakan, dari data-data yang peneliti peroleh sejak mulanya peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Hal tersebut akan membantu peneliti dalam menetapkan kesimpulan yang dihasilkan akan linier dengan rumusan Masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti.

### 1.9.5 Lini Masa Penelitian

**Tabel 1.1 Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	Tahun 2020-2021								
		Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Pengajuan Judul									
2.	Penyusunan Proposal									
3.	Sidang I									
4.	Penyusunan Draft									
5.	Sidang II									
6.	Revisi Draft Tesis									
7.	Sidang III									

### 1.10 Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Melandasi penyusunan tesis dengan isi antara lain; latar belakang peneliti, perumusan Masalah, identifikasi Masalah, tinjauan Pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini akan memberikan justifikasi pentingnya penelitian ini untuk dikaji secara mendalam dari berbagai sudut pandang ilmiah.

## **BAB II ISU KRISIS PENGUNGSI DI KAWASAN EROPA SEBAGAI ANCAMAN EKSTENSIAL TERHADAP HUNGARIA**

Bab ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika krisis pengungsi di kawasan Eropa, dan bagaimana krisis pengungsi di Eropa dipandang sebagai ancaman eksistensial oleh pemerintah Hungaria sebagai *securitizing actor*. Bab ini juga menjelaskan perkembangan krisis pengungsi yang terjadi di kawasan Eropa dengan melihat dua aspek dalam konsep pengungsi terkait dinamika *pushing factors* di kawasan Suriah yang memaksa mobilisasi para pengungsi untuk keluar dari kawasan tersebut dan mencari perlindungan di negara-negara lain dan *pulling factors* di kawasan Eropa yang menjadikan kawasan tersebut tersebut sebagai magnet pencari suaka sehingga menarik perhatian para pengungsi yang terpaksa pergi dari negara asalnya untuk mencari perlindungan di negara-negara Eropa, sehingga mempengaruhi sikap dan kebijakan beberapa negara-negara di Eropa, khususnya Hungaria dalam menghadapi krisis pengungsi.

## **BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH HUNGARIA SEBAGAI EXTRAORDINARY MEASURES TERHADAP KRISIS PENGUNGSI DI EROPA**

Bab ini bertujuan untuk mengeksplorasi *extraordinary measures* yang diambil pemerintah Hungaria untuk menghadapi krisis pengungsi sebagai ancaman eksistensial di Hungaria. *Extraordinary measures* dalam bab ini terdiri dari: kebijakan secara konstitusional dan instrumen-instrumen implementasinya terhadap krisis pengungsi dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Hungaria terhadap para pengungsi asal Suriah yang mencoba masuk di wilayahnya.

#### **BAB IV PROSES SEKURITISASI HUNGARIA TERHADAP ISU KRISIS PENGUNGGI ASAL SURIAH SEBAGAI ANCAMAN EKSTENSIAL KEAMANAN NASIONAL**

Bab ini menjelaskan bagaimana pemerintah Hungaria meyakinkan masyarakat Hungaria sebagai *referent object* bahwa krisis pengungsi merupakan ancaman eksistensial sehingga menjustifikasi *extraordinary measures* yang diambil. Bab ini juga menjelaskan Hungaria yang mensekritisasi para pengungsi asal Suriah dengan alasan bahwa isu krisis pengungsi yang terjadi di Hungaria menyebabkan peningkatan jumlah para pengungsi yang hendak masuk ke wilayah Hungaria sebagai ancaman eksistensial terhadap Hungaria. Proses Hungaria dalam mensekritisasi para pengungsi asal Suriah dapat dilihat dari tiga aspek utama dalam teori sekritisasi: *securitizing actor, speech act and referent object*.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian, kesimpulan ini akan menjawab secara komprehensif Masalah-Masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti.